

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
MELALUI WISATA PANTAI
(STUDI DI GAMPONG LABUHAN BAKTI KECAMATAN TEUPAH SELATAN
KABUPATEN SIMEULUE)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

YULIANA

NIM. 140404022

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

**YULIANA
140404022**

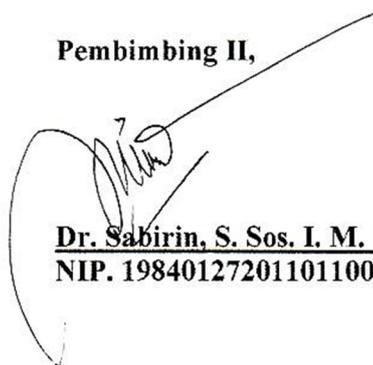
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003**

Pembimbing II,



**Dr. Sabirin, S. Sos. I. M. Si
NIP. 198401272011011008**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh:

**YULIANA
NIM. 140404025
Pada Hari/Tanggal**

**Jum'at, 25 Januari 2019 M
19 Jumadil Awal 1440 H**

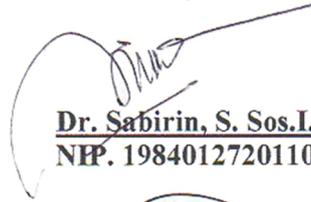
**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



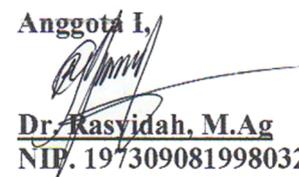
**Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003**

Sekretaris,



**Dr. Sabirin, S. Sos.I., M.Si
NIP. 19840127201101008**

Anggota I,



**Dr. Kasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002**

Anggota II,



**Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007**

**Mengetahui,
Dekan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Yuliana
NIM : 140404022
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat Karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas Karya saya, dan ternyata memang ditemukam bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Yang Menyatakan



Yuliana
NIM. 140404022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai”.

Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang karena beliauah kita dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Upaya penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan beban studi yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang hendak mengakhiri program S-1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan dari awal program perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan tercapai apabila tidak ada bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil. Berdasarkan oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, Bapak Dr. Fakhri,S. Sos, MA, Bapak-bapak dan Ibu-ibu wakil dekan, dosen dan asisten dosen, serta karyawan dilingkungan Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. T. Lembong Misbah, M.A, selaku Dekan III Bagian Kemahasiswaan dan sekaligus pembimbing pertama dan Bapak Dr. Sabirin,

- S. Sos.I., M.Si pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu guna mengarahkan dan membimbing serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Tbu staf pengajar Jurusan PMI yang telah mendidik, mengajar dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
 4. Bapak Roslan selaku Keuchik Gampong Labuhan Bhakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, dan kepada seluruh masyarakat Gampong Labuhan Bhakti yang telah banyak membantu dan memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
 5. Ucapan terima kasih juga kepada Ayahanda Jumadan dan Ibunda Murniati yang telah merawat, mendidik, dan membimbing dari kecil sampai dewasa saat ini, serta memberikan semangat, dukungan, doa kepada saya dalam menjalani hidup ini. sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Ucapan terima kasih juga kepada Adik saya tercinta Lusiana yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan untuk tetap berusaha dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Kawan-kawan saya Syahrul, Eka Riadi, Nurlaili, Fita Marisa, Evi Alista, Delvita Sari, dan teman-teman seperjuangan di program Studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2014 yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Berdasarkan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis di masa yang akan datang, dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 19 Oktober 2018
Penulis,



YULIANA

ABSTRAK

Strategi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui wisata pantai merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang ada pada masyarakat pesisir Gampong Labuhan Bakti. Penelitian ini untuk mengetahui kehidupan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, untuk mengetahui Startegi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan, dan untuk mengetahui hambatan dan peluang Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah kondisi ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti masih taraf sosial ekonomi lemah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ialah dengan cara pemberian tambahan modal kepada masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan, meningkatkan berbagai akses kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah mendapatkan berbagai informasi yang mereka perlukan. Sedangkan hambatan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir ialah Pemerintah terkendala dengan ketersediaan akses teknologi yang minim, ketidak adanya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat tidak memberikan izin kepada Pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata di tanah mereka, dan masyarakat belum mampu memberikan cindramata kepada wisatawan. Sedangkan peluangnya ialah Pemerintah membuka kursus bahasa inggris kepada pemuda-pemudi yang ada di kabupaten Simeulue, Pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk membuat sovnrir atau cindramata dari kayu, rotan, anyaman tikar, dan lain-lain dengan mengundang instruktur dari luar. Pemerintah memberikan bantuan berupa keramba untuk membudidayakan ikan, lobster. Selanjutnya bantuan perahu, jaring, mesin untuk para nelayan dan bibit padi untuk para petani.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat, dan Wisata Pantai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Konsep Strategi.....	12
C. Hakikat Pemerintah dan Pemerintah Daerah	14
1. Pengertian Pemerintah	14
2. Wewenang Pemerintah	16
3. Pemerintah Daerah.....	20
D. Masyarakat Pesisir	21
1. Pengertian Masyarakat.....	21
2. Masyarakat Pesisir	22
E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	24
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	25
2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.....	27
3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	28
BAB III: METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Metode Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Observasi	34
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisis Data	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Gampong Labuhan Bhakti	55
C. Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	67
D. Hambatan dan Peluang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat- Pesisir	80
 BAB V: PENUTUP	 86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012.....	41
Tabel 4.2. Sejarah Kepemimpinan Gampong Labuhan Bhakti	43
Tabel 4.3. Sejarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	44
Tabel 4.4. Luas Real Penggunaan Lahan di Gampong Labuhan Bhakti	44
Tabel 4.5. Penggunaan Lahan di Gampong Labuhan Bhakti	44
Tabel 4.6. Klarifikasi Jumlah Penduduk menurut Dusun	46
Tabel 4.7. Klarifikasi Jumlah Penduduk menurut Usia	47
Tabel 4.8. Sarana Prasarana Gampong Labuhan Bhakti	51
Tabel 4.9. Profesi Masyarakat Gampong Labuhan Bhakti	64
Tabel 4.10. Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur	65
Tabel 4.11. Pencari kerja Menurut Tingkat Pendidikan	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Lampiran 2: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian Ilmiah

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian

Lampiran 5: Foto-foto Kegiatan

Lampiran 6: Foto-Foto Sidang

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata di Indonesia saat ini telah memberikan peluang dalam meningkatkan perekonomian maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata juga membawa dampak peningkatan ekonomi, maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam, dan budaya yang semakin arif dan bijaksana. Kegiatan pariwisata tersebut sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yang memiliki potensi wisata. Kegiatan pariwisata juga berperan besar dalam memberikan peluang bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat.

Kegiatan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, pelestarian budaya, adat istiadat, dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Objek wisata menjadi komoditi yang banyak digunakan oleh suatu negara. Karena dengan adanya objek wisata maka potensi ekonomi sangat besar, seperti adanya pedagang yang menjajakan berbagai makanan dan minuman, penyediaan alat transportasi, dan berbagai jasa-jasa lainnya. Dengan demikian sector pariwisata juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti kondisi moneter, tingkat pendapatan rata-rata penduduk, tingkat daya beli masyarakat, dan lain-lain.

Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang berusaha bukan hanya dalam

bentuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tetapi juga peluang dalam bidang kerajinan kecil seperti cindramata, souvenir, dan oleh-oleh untuk dibawa pulang oleh pengunjung¹. Aspek pariwisata terus tumbuh dan berkembang, terutama pariwisata bahari. Salah satunya adalah objek wisata pantai yang terdapat di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, yang selama ini memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Hal inilah yang perlu diberdayakan oleh pemerintah setempat agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabupaten Simeulue terus mengembangkan beberapa sektor penting dalam mempercepat pembangunan daerah ini seperti wisata, kelautan, dan juga peternakan. Terdiri dari beberapa gugusan kepulauan, Kabupaten Simeulue memiliki beberapa deretan pantai yang bagus dan berpasir putih salah satunya adalah pantai Thailand atau yang sering di kenal dengan Pantai Labuhan Bakti.²

Secara geografis, letak pantai Thailand berada pada Gampong Labuhan Bakti, Kecamatan Teupah Selatan, kabupaten Simeulue. Untuk menuju ke pantai ini wisatawan harus melakukan perjalanan selama satu jam dari kota Sinabang. Namun jika wisatawan berasal dari luar kota, maka dapat menempuh dua jalur dengan terlebih dulu menuju ke pelabuhan Labuhan Haji di Aceh Selatan, lalu menyebrang ke Pelabuhan Sinabang, jika ingin perjalanan yang lebih cepat wisatawan bisa menggunakan jalur udara dengan mendarat di Bandara Lasikin yang letaknya 12 kilometer dari kota Sinabang.

¹Heru Nugroho, *Industri Pariwisata dalam Perspektif dan Konfigurasi Sistem Dunia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), hal. 19.

²<https://jalanwisata.id/pantai-labuhan-bhakti-simeulue-aceh/>, wisata Aceh.(diakses tanggal 27 Januari 2018).

Adapun fasilitas yang tersedia di pantai Labuhan Bakti terbilang cukup lengkap, di sekitarnya terdapat beberapa gubuk sederhana yang bisa digunakan wisatawan untuk beristirahat. Selain itu sudah tersedia pula fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir yang luas, mesjid untuk beribadah bagi umat muslim dan puskesmas. Disekitaran pantai ini juga bisa ditemukan berbagai warung yang menjual makanan mulai dari makanan ringan hingga olahan seafood termasuk di dalamnya olahan lobster, bahkan bukan hanya itu saja pantai Labuhan Bakti ini juga memiliki keistimewaan dimana warna pasirnya yang berbeda-beda yaitu pasir putih dan pasir merah sehingga mengundang ketertarikan para pengunjung.

Berbagai kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat Gampong Labuhan Bakti, diantaranya membuka warung-warung yang menyediakan berbagai makanan, menyewakan alat-alat menyelam, menjual aksesoris-aksesoris khas daerah Simeulue dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, masyarakat juga mendapat bagi hasil uang tiket masuk dan uang parkir dari pemerintah Kabupaten Simeulue. Kondisi ini tentunya dapat berjalan dengan baik berkat adanya pemberdayaan dari pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 11.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ □ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا □ أَلَا مَرَدٌّ لَهُ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنَ وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.³

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.⁴

Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh adalah untuk lebih memberdayakan usaha masyarakat pesisir agar lebih efisien, produktif dan berdayasaing, yaitu dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Dalam rangka pembinaan usaha masyarakat pesisir perlu

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Alwaah, 2006), Hal. 370.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 370.

dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi.

Salah satu strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif individu anggota masyarakat adalah melalui pendekatan kelompok. Pembangunan yang ditujukan kepada pengembangan masyarakat, akan mudah dipahami apabila melibatkan agen-agen lokal melalui suatu wadah yang dinamakan kelompok. Menurut Sumarti, dikarenakan dalam melakukan beragam aktivitas pencaharian nafkah, setiap orang cenderung berkelompok.⁵

Pemberdayaan masyarakat pesisir selain merupakan proses pengaliran antara pihak penguasa kepada yang dikuasai juga meliputi penguatan pada pranata-pranatanya. Dalam rangka pembangunan nasional upaya pembangunan masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, perlindungan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan politik yang dijalankan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai, untuk itu penulis ingin mengkaji dan

⁵Sumarti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,(Bandung: Humaniora, 2006), hal. 19.

⁶Ambar S Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hal 41.

membahas melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai” (Studi di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue?
3. Bagaimana hambatan dan peluang pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehidupan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

2. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.
3. Untuk mengetahui hambatan dan peluang pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa, khususnya Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkait pemberdayaan masyarakat pesisir.
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengetahuan tentang kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang upaya pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir.
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang upaya pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, berikut ini didefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Strategi

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁷ Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁸

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Simeulue berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti berkaitan dengan objek wisata yang terdapat di gampong tersebut.

2. Pemerintah

⁷ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 29.

⁸ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Cet. Ke-3. (Bandung: Armilo, 2001), hal. 59.

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan.⁹ Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pemerintah dalam penulisan ini adalah kelengkapan daerah Kabupaten Simeulue yang melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Simeulue.

3. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.¹⁰ Memberdayakan masyarakat peisir adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹¹

Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, terencana dan berkesinambungan di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue melalui wisata pantai.

4. Masyarakat pesisir

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

¹⁰Ambar S Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hal. 19.

¹¹Ginandjar Karta sasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 2004), hal. 144.

Masyarakat pesisir adalah sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh laut baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya¹². Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan, seperti: pegawai negeri, pemilik warung, kontraktor, jasa potong rambut, lainnya¹³. Menurut Nikijuluw adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan.¹⁴ Masyarakat pesisir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendiami Gampong Labuhan Bhakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

5. Wisata pantai

Wisata pantai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut¹⁵. Pariwisata yang dimaksud dalam penulisan ini adalah objek wisata pantai pesisir yang terdapat di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

¹²Dahuri R, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Teratur*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 9.

¹³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 12.

¹⁴Nikijuluw V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 11.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No.9.Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat telah diteliti oleh Lucky Zamzami Jurusan Antropologi Fisip Universitas Andalas Padang. Ia meneliti tentang pemberdayaan masyarakat pesisir di Nagari Ampiang Perak, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang berprofesi nelayan.¹

Rahmawati, mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi melakukan penelitian tentang pariwisata. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati yaitu jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi biota laut di Gampong Iboih sangat baik dan terjaga. Upaya yang dilakukan masyarakat Iboih dalam melestarikan biota laut yaitu dengan mengawasi dan menjaga lingkungan laut agar tetap bersih dan tidak tercemar. Hubungan pelestarian biota laut di Gampong Iboih dengan daya tarik biota laut sangat erat.²

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dahlan Tampubolon, tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten baru

¹http://www.academia.edu/30882812/Pemberdayaan_Ekonomi_Masyarakat_Pesisir_di_Nagara_Ampiang_Perak_Sumatera_Barat, Lucky Zamzami, Skripsi. Padang: Fisip Universitas Andalas Padang, 2011. Skripsi yang dipublikasikan.

²Rahmawati, *Upaya Pelestarian Biota Laut terhadap Daya Tarik Wisatawan (Turis) di Gampong Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

mengalami pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif tinggi, di mana penduduknya sebagian besar bermukim di perdesaan dan wilayah pesisir. Masyarakat menggantungkan hidupnya di sekitar sektor perikanan. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki minat dan semangat berwirausaha yang oleh didorong dengan kebutuhan dan biaya hidup yang semakin tinggi. Minat dan semangat berwirausaha ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.³ Dari penelitian-penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian saya di mana perbedaannya yaitu: tempat, waktu, dan objek sasarannya.

B. Konsep Strategi

Secara etimologi strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses *public* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Strategi menurut Setiawan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana

³Dahlan Tampubolon, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jurnal SOROT 8 (2) Lembaga Penelitian Universitas Riau ISSN 1907 – 364X, hal. 153-161.

untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.⁴ Menurut Sjafrizal, strategi secara umum diartikan sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan secara lebih baik dan cepat.⁵

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁶ Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁷

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Pelayanan bagi *public* yang baik adalah dambaan bagi setiap orang, pelayanan *public* diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik juga dikaitkan dengan jasa layanan yang dilaksanakan oleh instansi dalam upaya untuk memberikan rasa kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan pihak pelanggan.

⁴Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), hal. 8.

⁵Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Baduose Media, 2009), hal. 291.

⁶David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 21.

⁷Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1996), hal. 59.

Strategi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai pesisir yang relevan bagi masyarakat pesisir dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan komitmen serta manfaat dan arti penting tanggung jawab dan kerjasama.
2. Bicara dengan ramah (luwes) dan mudah dipahami orang lain.
3. Adanya pelayanan administrasi *public* yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, inklusif, *accessible* dan lain-lain.

C. Hakikat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.⁸Pemerintahan adalah *besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan.⁹

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan

⁸Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*, (Yogyakarta: Andi Ofside, 2002), hal. 5.

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹⁰

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.¹¹

Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup dua

¹⁰Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Pressindo, 2008), hal. 41.

¹¹Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hal. 101.

unsur utama yaitu: *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.¹²

2. Wewenang Pemerintah

Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara.maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.¹³

Bentuk kewenangan pemerintahan ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata *Centre* yang artinya adalah pusat atau tengah.Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi.¹⁴ Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang

¹²Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 25.

¹³Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 9-10.

¹⁴Kansil, C.S.T .*Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 82.

pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam kerangka kenegaraan kesatuan.¹⁵

Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai otonomi daerah. Salah satu cita-cita reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 yaitu mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Cita-cita tersebut kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Sistem pemerintahan sentralisasi diterapkan di Indonesia sebelum era reformasi yaitu mulai era orde lama hingga orde baru. Penggunaan sistem sentralisasi pemerintahan sebelum era reformasi ini dapat diketahui dari pembangunan di daerah tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah dan berujung pada konflik di beberapa daerah seperti di Aceh dan Papua. Selain itu Sumber Daya Alam yang ada di daerah dijadikan ladang penghasilan sehingga hasilnya tersebut disetor ke pemerintah pusat.

¹⁵Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001), hal. 174.

Setelah ada reformasi, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah yang bersifat desentralisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.¹⁶

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan mengenai pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan/yustisi, dan agama (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

¹⁶Bagir Manan, *Menyongsong...*, hal. 175.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya daerah.¹⁷ Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang dibidang tertentu secara vertikal dari institusi/ lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.¹⁸

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain.¹⁹

Pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

¹⁷M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hal. 68.

¹⁸Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000), hal. 11.

¹⁹Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati...*, hal. 11.

3. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pemerintahan Daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, yang mana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah Satu Fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi yaitu Membuat Peraturan Daerah. Sesuai dengan tugas dan wewenang dari DPRD, membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan meyetujui rancangan Perda tentang APBD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.²⁰ Di Aceh, istilah DPRD dikenal dengan DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya.

²⁰Atmosudirjo S. Prajudi, *Administrasi Manajemen Umum*, (Jakarta: CV Mas, 2000), hal. 15.

Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini berarti betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Masyarakat Pesisir

1. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang dituntut untuk selalu melakukan interaksi antara satu sama lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Manusia dalam menjalankan kehidupannya akan membentuk suatu ikatan terkecil yang disebut keluarga. Keluarga berfungsi dalam hal pemenuhan kebutuhan *bio-psiko-sosio* manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam perkembangannya kumpulan dari beberapa keluarga akan membentuk suatu masyarakat, yang akan tumbuh semakin luas menjadi suatu bangsa. Tata cara kehidupan setiap masyarakat dibentuk berdasarkan perpaduan

antara berbagai sikap, cara berpikir, cara bergaul dan cara hidup dari tiap masing-masing individu sesuai dengan kultur yang dipercaya dan diyakini oleh setiap individu²¹.

Masyarakat adalah sekelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial²².

Jadi, masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Masyarakat dalam arti sempit merupakan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan. Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan memiliki aturan bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan.

2. Masyarakat Pesisir

Menurut Hortondalam Waluya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan

²¹Alisjabana, *Modul Peran Serta Masyarakat dan Swasta Serta Pemuda dalam Pengelolaan dan Pembangunan Kota dalam Manajemen Lingkungan Perkotaan*, (Surabaya: Lembaga Penelitian ITS, 2001), hal. 32.

²²Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 19.

dalam kelompok itu. Pada bagian lain, Horton dalam Waluyamengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk sosial dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.²³ Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.²⁴ Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusiamanusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.²⁵

Salah satu tempat tinggal masyarakat adalah wilayah pesisir. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya.²⁶ Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Di wilayah ini, sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung seperti menangkap

²³ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Sosial di Masyarakat*, (Jakarta: Pribumi Mekar, 2009), hal. 10.

²⁴ Solo Soemardjandan Soleman, Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997), hal. 13.

²⁵ Solo Soemardjandan Soleman, Soemardi, *Setangkai, ...*, hal. 19.

²⁶ Dahuri Rokhmin, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: LISPI, 2005), hal. 5.

ikan dan pembudidayaan terumbu karang maupun tidak langsung seperti pemanfaatan pantai sebagai objek wisata.²⁷

Mata pencarian masyarakat pesisir tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam seperti nelayan, petambak, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap²⁸. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya adalah menangkap ikan. Sebagian hasil tangkapan tersebut dikonsumsi untuk keperluan rumah atau dijual seluruhnya. Biasanya isteri nelayan akan mengambil peran dalam urusan penjualan ikan serta bertanggung jawab mengurus domestik rumahtangga.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial dan ekonomi yang terkait dengan sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan. Secara khusus masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan, sedangkan secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya pengembangan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis

²⁷Dahuri Rokhmin, *Pendayagunaan...*, hal. 11.

²⁸ Kusnadi, *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000), hal. 34.

bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya.²⁹

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Memberdayakan masyarakat peisir menurut Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.³⁰ Sedangkan Sumodiningrat menyatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat,
- b. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran,(3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.³¹

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasasmita harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah³².

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, karena pada

²⁹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group,2013), hal. 23.

³⁰GinandjarKartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 2004), hal.144.

³¹Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*,(Jakrta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 134.

³²Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan...*, hal. 159.

dasarnya masyarakat memiliki potensi gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi tradisional ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia.³³

Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Menurut Ginandjar Kartasasmita pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.³⁴

³³Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan...*, hal. 161.

³⁴Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan...*, hal.41.

Berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Indikator permasalahan ekonomi meliputi: mata pencaharian, sumber pendapatan, jumlah pendapatan dan pengalokasian pendapatan.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka dilakukan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, sebagai berikut:

- a. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
- c. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
- d. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal, memiliki pasar yang jelas, dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya, dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal, dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian.
- e. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

- f. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.³⁵

Pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi kultural dan struktural.³⁶ Dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat pesisir, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kemampuan menghadapi teknologi dan informasi sehingga dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang baru saja diterapkan yaitu mengembangkan mata pencaharian alternatif, akses terhadap modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan pengembangan aksi kolektif. Uraian singkat tentang kelima program ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan mata pencaharian alternatif

³⁵AmboTuwo, *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), hal. 28.

³⁶Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006), hal. 11.

Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan penurunan. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.³⁷

b. Akses terhadap modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya jaminan, asuransi, dan ekuitas.³⁸

c. Akses terhadap teknologi

³⁷Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan, ...*, hal. 31.

³⁸Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan, ...*, hal. 33.

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga setelah produksi dan pemasaran. Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal, dengan kata lain dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah.³⁹

d. Akses terhadap pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya.⁴⁰ Mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir alat dan bahan perikanan. Kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat

³⁹Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan, ...*, hal. 33.

⁴⁰Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan, ...*, hal. 34.

terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.⁴¹

e. Pengembangan aksi kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.⁴²

Berdasarkan pendapat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditempuh melalui lima pendekatan yaitu mengembangkan mata pencaharian alternatif, membuka akses terhadap modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan mengembangkan aksi terhadap kolektif. Kelima pendekatan ini diyakini mampu memberdayakan masyarakat pesisir.

⁴¹Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan, ...*, hal. 35.

⁴²Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan, ...*, hal. 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti. Menurut sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam arti penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue. Gampong Labuhan Bakti merupakan satu dari 19 Gampong yang ada di Kecamatan Teupah Selatan, secara fisiografi Gampong Labuhan Bakti

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 9.

²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2006), hal. 47.

terdiri dari 3 jenis yaitu: perbukitan, dataran, dan pesisir/marin. Dataran digunakan masyarakat untuk permukiman dan persawahan, perbukitan digunakan untuk bertani dan berkebun. Marin atau pesisir digunakan masyarakat untuk mencari ikan dan sebagian digunakan untuk aktivitas pariwisata, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas perekonomian dibidang pariwisata.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang di wawancarai untuk dimintai formasi oleh pewawancara. Informan yang dijadikan sampel berjumlah 10 orang yaitu, Keucik Gampong Labuhan Bakti, 7 orang pedagang di objek wisata dan masyarakat Gampong Labuhan Bakti, Camat Kecamatan Teupah Selatan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue.

Penentuan informan dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yaitu mencari data sampai hasil datanya jenuh³. Peneliti memilih informan menurut kriteria atau tujuan penelitian yang akan diteliti. Menurut penulis, para informan di atas sangat sesuai dengan topic penelitian ini Selain itu, mereka yang dipilih paling kredibel untuk memberikan formasi tentang gambaran ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti dan juga upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Tehnik pengumpulan data dilakukan

³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 292.

secara triangulasi (gabungan) beberapa tehnik, sedangkan analisis data bersifat induktif kededuktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi pada penelitian ini peneliti memilih tehnik pengumpulan data.⁴

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap serta akurat, sehingga mempermudah dalam memahami Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai, maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial atau gejala-gejala psikis dengan dengan jalan mengamati dan mencatat. Observasi adalah mengamati dan mendengar serta menggunakan pancaindra dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁵

Menurut S. Margono dalam bukunya Nurul Zuriah mengemukakan bahwa metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya.⁶ Adapun Observasi yang dilakukan peneliti adalah Observasi partisipasi (*participant*

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 225.

⁵Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 64.

⁶Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara , 2006), hal.173.

Observer), yang dikatakan observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan langsung dilapangan bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamatan betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.⁷

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue. Kegiatan observasi meliputi pengamatan secara langsung terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Gampong Labuhan Bakti, seperti: mata pencaharian masyarakat, jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, mengobservasi besaran modal dan pendapatan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga permasalahan yang dihadapi masyarakat gampong Labuhan Bakti dalam upaya meningkatkan ekonominya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan langsung melalui Tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara menurut Sugiyono digunakan sebagai tehnik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁸

⁷Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 116.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 137.

Dalam melakukan teknik wawancara terhadap forman, hendaklah pertanyaan meliputi apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana.⁹Pedoman wawancara secara garis besar berupa daftar pertanyaan yang sudah disusun peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Gampong Labuhan Bakti, Keuchik Gampong Labuhan Bakti, Camat Teupah Selatan, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue, mengenai gambaran ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bakti dan juga Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen yang penulis teliti dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masyarakat, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan data penelitian ini. Data dalam penelitian ini diambil dari kantor Keuchik Gampong Labuhan Bakti, kantor Kecamatan Teupah Selatan dan juga dari Website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Tujuan analisis data kualitatif yaitu: (1) Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang

⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 104.

tuntas terhadap proses tersebut; (2) Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam penelitian ini, proses analisis akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah terdokumentasikan oleh penulis, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut sangat banyak, maka setelah dipelajari dan ditelaah dilakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi yaitu suatu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu diambil dan dimasukkan atau dikategorisasikan ke dalam tema-tema penting. Miles dan Huberman (1992) dalam Bukunya Muhammad Idrus menyatakan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.¹⁰

2. *Display Data*

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu *display data*. *Display data* Yaitu merupakan penyajian tema-tema yang sudah terbentuk dari proses reduksi data kedalam kategori yang lebih besar dan lebih luas lingkungnya

¹⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 150.

untuk mendukung terbentuknya sebuah kesimpulan. Hal ini dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Bukunya Muhammad Idrus, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data merupakan aktivitas yang terikat langsung menggunakan proses analisis model yang interaktif.¹¹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat).¹² Penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengambil inti sari dan informasi yang penting-penting saja, sehingga menjawab semua rumusan masalah.

¹¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 151.

¹²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang, merupakan hasil perjuangan secara estafet dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue di Luan Balu. Sebelum tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kewedanaan dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sejak tahun 1967 berstatus sebagai wilayah pembantu Bupati dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1996 menjadi Kabupaten Administrasi dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 diresmikan menjadi Kabupaten Otonom berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 1999 bersamaan dengan Kabupaten Bireuen.¹

Pada awal dibentuknya Simeulue sebagai Kabupaten Otonom, Kabupaten Simeulue hanya terdiri dari 5 kecamatan dengan ibukota berada di Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur. Untuk kemudian pembagian wilayah administrasi terus berkembang hingga saat ini menjadi 10 kecamatan dan 138 desa dengan Ibukota Kabupaten tetap berada di Sinabang. Berdasarkan digitasi Peta RBI Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah daratan Simeulue adalah 183.809,50 Ha, atau berkisar 3,26 % luas wilayah daratan Provinsi Aceh, dengan batas wilayah sebagai berikut:

¹RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017, hal. 1.

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.²

PETA KABUPATEN SIMEULUE



Kabupaten Simeulue ini memiliki beberapa pulau kecil dengan ekosistem biota laut yang sangat banyak. Laut Simeulue yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Hindia dan perairan dunia yang menjadi lintasan jalur pelayaran internasional. Kabupaten Simeulue yang dikelilingi laut ini mempunyai sumber daya alam dalam sektor perikanan yang cukup menjanjikan, seperti budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, budidaya rumput laut, budidaya tripang dan budidaya lobster atau dalam bahasa pulau disebut “lahok”. Lobster atau lahok yang

²RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017, hal. 1.

menjadi primadona kebanggaan Simeulue ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Lobster juga mempunyai protein yang tinggi ini cukup banyak peminatnya. Lobster juga di impor keluar daerah bahkan sampai keluar negeri.

Keadaan topografi Pulau Simeulue dimana titik terendah terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut. Hasil interpolasi garis kontur interval 50 meter dari peta rupa bumi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0-300 meter dari permukaan laut dan bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan dibawah 18° terletak di bagian tengah pulau terutama pada daerah pegunungan di sebelah Utara dan Selatan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 bahwa terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah yang dimiliki Kabupaten Simeulue yang dipetakan kedalam kawasan strategis, antara lain:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lingkup kepentingan kabupaten, kawasan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, juga mencakup kawasan terpencil dan kawasan kritis yang tidak semata-mata pengembangannya meliputi kawasan prioritas cepat berkembang tetapi juga mencakup kawasan prioritas terbelakang dan kawasan kritis.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa KSK Adat Terpencil di Kecamatan Simeulue Barat, yaitu di Desa Amabaan (Dusun Laulo) dan di Desa Layabaung.

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sebesar 83.961 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 88.963 jiwa atau terjadi peningkatan sebesar 5,96 % selama kurun waktu 6 tahun.

Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Tingkat Pertumbuhan (%)			Kepadatan (Jiwa/Km ²)		
		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Teupah Selatan	8972	9033	9103	2253	2277	2299	-4,95	0,68	0,77	40	41	41
2	Simeulue Timur	29952	1103	2455	7540	7835	8114	-3,18	3,84	4,35	115	120	125
3	Teupah Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teupah Barat	7472	7563	7741	1898	1920	1935	-4,4	1,22	2,35	51	52	53
5	Simeulue Tengah	9626	9782	22	2479	2534	2596	-4,59	1,62	2,45	65	66	68
6	Simeulue Cut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Teluk Dalam	5043	5115	5203	1203	1205	1226	-0,32	1,43	1,72	22	23	23
8	Salang	8082	8175	8478	1869	1898	1968	-4,91	1,15	3,71	41	41	43
9	Simeulue Barat	10730	10731	10874	2358	2375	2416	-0,74	0,01	1,33	24	24	24
10	Alafan	4827	4718	4779	1044	1014	1014	-3,74	-2,26	1,29	25	25	25
Jumlah			20	8655	544	8	592	-3,35	0,96	2,25	48	49	50

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, 2014.³

Adapun Penelitian ini dilakukan di Gampong Labuhan Bakti kecamatan Teupah Selatan. Penduduk Labuhan Bakti mempunyai pemukiman berjajar disepanjang jalan. Mata pencarian berdasarkan tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir membangun tempat tinggal dekat dengan pantai dan umumnya mereka memiliki mata pencarian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal didaerah daratan mempunyai mata pencarian sebagai petani/kebun, masyarakat di sini juga mempunyai mata pencarian sebagai tukang kayu, pedagang, dan buruh industri serta kerja sampingan lainnya. Sebagian kecil masyarakat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Seiring berkembangnya objek

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Simeulue dalam Angka 2016*, (Sinabang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, 2017), hlm. 15.

wisata masyarakat mulai membuka berbagai jenis usaha di objek wisata tersebut, diantaranya berdagang, buka warung, jasa angkutan boat, dan berbagai jenis usaha masyarakat lainnya yang dapat dilakukan objek wisata di Gampong Labuhan Bakti.

Berdasarkan pengakuan Bapak Mansyur menurut cerita dari Tetua Gampong dulu Gampong Labuhan Bakti yang masih dusun dinamakan dusun Gudang karena pada zaman dahulu kala ada beberapa orang pendatang dari Meulabo masuk ke Gampong Labuhan Bakti pada masa itu belum menjadi sebuah Gampong dan mereka mendirikan Gudang koperasi di pinggir laut.⁴

Gampong Labuhan Bakti ada ketika pada tahun 2002 terjadi pemekaran desa dimana pada saat tersebut masi dalam tahap desa persiapan karena sebelumnya adalah satu Dusun dari Gampong induk yaitu gampong labuhan bajau, kemudian pada tahun 2003 resmi menjadi Gampong definitif dengan Keucik yang bernama Iskandar S.⁵

Dengan seiringnya penambahan penduduk yang berkembang dengan melanjutkan kehidupan dengan berbagai profesi seperti: petani, pekebun, nelayan, dan para pedagang sehingga terbentuk dan terbagi dalam beberapa wilayah yang disebut dusun yaitu:

- a. Dusun Tani Jaya
- b. Dusun Kawat
- c. Dusun Gudang
- d. Dusun Indah jaya
- e. Dusun Pusako Abadi

⁴Hasil wawancara dengan Pak Mansyur, Masyarakat Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 30 Juni 2018.

⁵Dokumentasi RPJMDES tahun 2018 Gampong Labuhan Bakti.

Untuk lebih jelas, berikut tabel tentang kepemimpinan Gampong Labuhan Bakti dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.

Tabel 4.2. Sejarah Kepemimpinan Gampong Labuhan Bakti

No	Priode	Nama-nama Kepala Desa	Sumber Informasi	Keterangan
1	2003-2008	Iskandar. S	Aparatur Gampong	Kepala desa
2	2006-2009	Abd Salam	Hasanuddin	Kepala desa
3	2009-2010	Armansyah	Hasanuddin	Pj. Kepala desa
4	2010-2013	Roslan	Hasanuddin	Kepala desa
5	2013-2014	Armansyah	Hasanuddin	Pj. Kepala desa
6	2014-2017	Irfanudin	Hasanuddin	Kepala desa
7	2017-2018	Ricki Adryansyah	Aparatur Gampong	Pj. Kepala desa
8	2018-2023	Roslan	Aparatur gampong	Kepala desa

Sumber: Dokumentasi RPJMDESGampong Labuhan Bakti 2018.

Tabel 4.3. Sejarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

No	Priode	Nama BPD	Sumber informasi	Keterangan
1	2003-2006	Sudirman S.Pd.I	Aparatur gampong	BPD
2	2006-2011	Masri.T	Aparatur gampong	BPD
3	2011-2014	Darmil	Aparatur gampong	BPD
4	2014-2016	Ibnu Ajad	Aparatur gampong	BPD
5	2016-2017	Risman. T	Aparatur gampong	BPD
6	2017-2022	Afrisal	Aparatur gampong	BPD

Sumber: Dokumentasi RPJMDESGampong Labuhan Bhakti 2018.

Adapun luas wilayah Gampong Labuhan Bakti adalah 1600 Ha dan untuk penggunaan lahan di gampong labuhan bakti perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4. 4. Luas Real Penggunaan Lahan di Gampong Labuhan Bakti

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Ha
1	Sawah	120
	a. Irigasi teknis	-
	b. Irigasi Teknis	-
	c. Tadah Hujan	120
2	Bukan Sawah	14
	a. Pekarangan / Bangunan	20

	b. Tegalan	-
	c. Lain-lain (jalan, makam, sungai)	4

Sumber: Dokumentasi RPJMDES Gampong Labuhan Bakti 2018.

Tabel 4. 5. Penggunaan Lahan di Gampong Labuhan Bakti

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Area pusat desa	3	Berfungsi
2	Area pemukiman	20	Berfungsi
3	Area perkantoran	0,5	Berfungsi
4	Area perkebunan	72	Berfungsi
5	Area pendidikan	2	Berfungsi
6	Area industry	1	Berfungsi
7	Area perdagangan/pasar desa	1	Berfungsi
8	Area pusat pelayanan kesehatan	0,5	Berfungsi
9	Area olaraga	2	Berfungsi
10	Area rawa-rawa/hutan	2	Berfungsi
11	Lintasan saluran	1	Berfungsi
12	Jalan/lorong	2	Berfungsi
13	Jebatan dan gorong-gorong	1	Berfungsi
14	Kuburan	0,5	Berfungsi

Sumber: Dokumentasi RPJMDES Gampong Labuhan Bakti 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan lahan di Gampong Labuhan Bakti masih berfungsi selayaknya dan masih bisa digunakan untuk keperluan masyarakat Labuhan Bakti untuk kegiatan dan aktivitas mereka sehari-hari dalam melaksanakan kehidupannya.

Wilayah Labuhan Bakti umumnya beriklim yang ditentukan oleh penyebaran musim, dimana musim Barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Februari, ditandai dengan terjadinya musim badai dan gelombang besar sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus ditandai dengan

musim kemarau diselingi oleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang. Adapun batasan-batasan Gampong Labuhan Bakti ialah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan lautan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Blang Sebel
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Labuhan Bajau
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lautan

2. Keadaan Penduduk dan Sosial masyarakat Gampong Labuhan Bakti

Gampong Labuhan Bakti juga merupakan kota Kecamatan Teupah Selatan. sebagian penduduknya merupakan pendatang baik karena faktor perkawinan, faktor ekonomi, faktor politik, faktor persaudaraan maupun faktor keamanan. Adapun jumlah Penduduk Gampong Labuhan Bakti berjumlah 1.243 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 612 jiwa dan jumlah perempuan adalah sebanyak 631 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut perdusun adalah Dusun Tani Jaya sebanyak 218 jiwa, Dusun Kawat adalah sebanyak 245 jiwa, Dusun Gudang 341 jiwa, Dusun Indah jaya adalah sebanyak 250 jiwa, dan Dusun Pusako Abadi adalah sebanyak 180 jiwa. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 4.6. Klarifikasi Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Nama-nama Dusun	Jumlah jiwa
1	Dusun Tani Jaya	218
2	Dusun Kawat	254
3	Dusun Gudang	341
4	Dusun Indah Jaya	250
5	Dusun Pusako Abadi	180

Sumber: Dokumentasi RPJMDES tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa dari lima dusun yang di dapat di Gampong Labuhan Bakti, Jumlah penduduk terbanyak adalah Dusun Gudang, selanjutnya urutan kedua Dusun Kawat. Ketiga Dusun Indah Jaya, kemudian disusul oleh Dusun Pusako Abadi, selajutnya diurutan terakhir adalah Dusun Tani Jaya. Jumlah keseluruhan penduduk Gampong Labuhan Bakti 1.243 jiwa, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

Tabel 4.7. Klarifikasi Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	68	73	141
2	6-13	82	78	160
3	14-18	87	90	177
4	19-25	134	145	279
5	26-45	95	95	190
6	46-57	80	90	170
7	58 Keatas	66	60	126
8	Jumlah	612	631	1.243

Sumber: Dokumentasi RPJMDES tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa penduduk terbanyak menurut golongan usianya adalah penduduk yang berumur 19-25 tahun, selanjutnya kedua usia penduduk yang berumur 26-45 tahun, ketiga usia penduduk yang berumur 14-18 tahun, keempat usia penduduk yang berumur 46-57 tahun, kelima usia penduduk 6-13 tahun, kemudian di susul usia penduduk yang berumur 0-5 tahun, selanjutnya diurutan terahir yang paling sedikit usia penduduk yang berumur 58 tahun keatas.

Adapun Kehidupan sosial kemasyarakatan Gampong Labuhan Bakti sangat kental dengan sikap solidaritas sesama dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dengan baik. Kondisi sosial Gampong Labuhan Bakti masih kental dengan adat istiadat Budaya Simeulue.

Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional persaudaraan dan keagamaan yang sangat kuat, dimana pada dasarnya masyarakat Labuhan Bakti memang ada hubungan saudara antara satu dengan yang lain yang berasal dari nenek moyang hingga pertalian sampai sekarang.

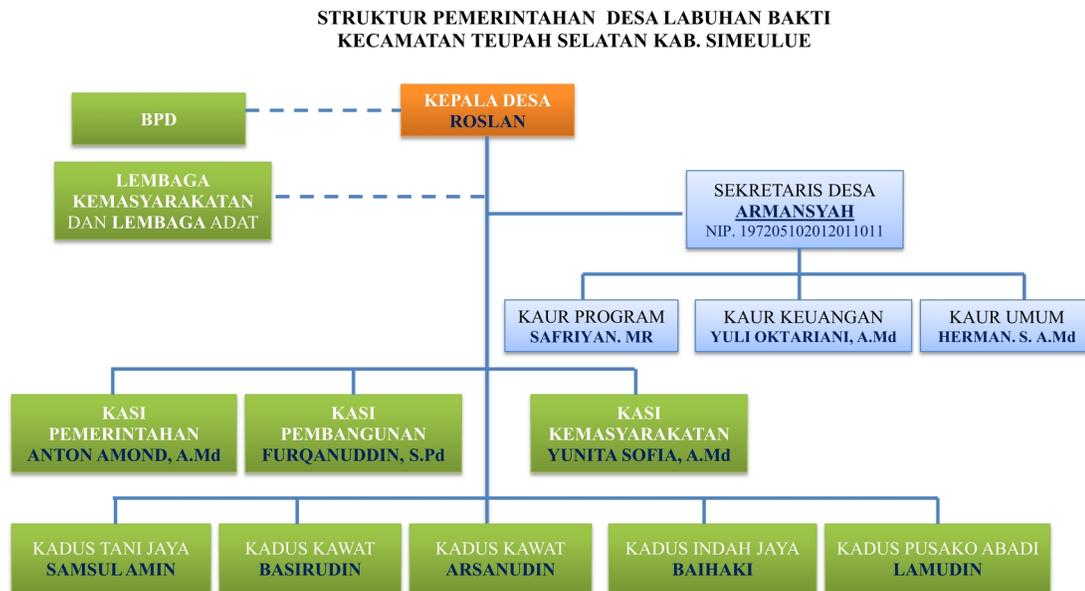
Selain karena faktor tersebut rasa persaudaraan dalam keagamaan dimana dalam agama islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasi sayang, memperhatikan antara sesama dan membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan Ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Berdasarkan pengakuan bapak Safrian Mr kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat Labuhan Bakti masih sangat aktif seperti kegiatan sosial yang sering dilakukan baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun pemuda adalah seperti gotong royong, takziah ketempat orang meninggal, menjenguk orang sakit, menghadiri acara pernikahan, pengajian setiap hari jumat, kegiatan posyandu, kegiatan olahraga, dan lain-lain.⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Labuhan Bakti sangat aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial, baik tingkat bapak-bapak, pemuda, dan ibu-ibu.

⁶Wawancara dengan bapak Safrian Mr, KAUR Program Gampong Labuhan Bakti, tgl 21 juni 2018.

3. Struktur Organisasi Gampong Labuhan Bakti



Berdasarkan bagan diatas dapat dipahami bahwa yang memegang kendali pemerintahan di Gampong Labuhan Bakti dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat adalah bapak Roslan, sebagai Kepala Desa. Kemudian, bapak Armansyah yang membantunya dalam mengurus adminitrasi dalam pemerintahan, beliau sebagai Sekdes (Sekretaris Desa). Setelah itu, untuk menjamin jalanya roda pemerintahan dengan baik serta pertampungannya aspirasi masyarakat. Di tujuklah seseorang yang bertanggung jawab terhadap hal ini, yaitu Bapak Afrisal, sebagai ketua BPD (badan perwakilan desa).

Agar roda pemerintahan Gampong Labuhan Bakti semakin maksimal dijalankan, di bentuk masing-masing KAUR (Kepala Urusan) untuk membantu kepala Desa dalam melayani masyarakat yang terdiri dari enam KAUR yaitu Bapak Safriyan. MR sebagai KAUR Program, Ibu Yuni Oktariani, Amd. Keb sebagai KAUR Keuangan, Bapak Herman Saputra, A. Md Sebagai KAUR Umum, Bapak

Anton Amondaya, Amk sebagai KAUR Pemerintahan, Bapak Furkanudin, Spd sebagai KAUR Pembangunan, dan Ibu Yunita Sofya, A.Md Sebagai KAUR Sosial Kemasyarakatan.

Gampong Labuhan Bakti terbagi dalam lima dusun, dan masing-masing dusun ditunjuk seorang Kadus (Kepala Dusun) yang membantu kepala desa dalam Mengurus masyarakat pada setiap dusun yang telah di tentukan. Para kepala dusun di Gampong Labuhan Bakti diantaranya ialah bapak Erlan Soni sebagai Kadus Tani Jaya, Bapak Basirudin sebagai Kadus Kawat, Bapak Arsanudin sebagai Kadus Gudang, Bapak Baihaki sebagai Kadus Inda Jaya, dan Bapak Lamudin Sebagai Kadus Pusako Abadi.

4. Pembangunan Gampong yang Telah Ada

Dalam pembangunan memiliki visi untuk memberdayakan manusia dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya yang didalamnya termasuk pembangunan sarana dan prasarana.Salah satu sarana yang sangat penting diperhatikan pada masyarakat pesisir adalah tempat tinggal. Hasil pengamatan peneliti Kondisi tempat tinggal masyarakat Gampong Labuhan Bakti masih sangat sederhana.⁷Berdasarkan pengakuan bapak Muhammad Yayan pada tahun 2013 pernah mengusulkan bantuan dana rehab kepada masyarakat. Namun setelah diverifikasi hanya 85 unit yang dinyatakan layak untuk direhab.Puluhan unit rumah tersebut berada di empat gampong di Simeulue, yaitu Labuhan Jaya,

⁷Hasil Pengamatan Peneliti Terhadap Lokasi Penelitian, pada tanggal 26 juni 2018.

Labuhan Bakti, Blang Seubel dan Gampong Pulau Bengkalak di Kecamatan Teupah Selatan.⁸

Dari pengakuan Bapak Yayan dapat dipahami bahwa kondisi rumah masyarakat di Kecamatan Teupah Selatan, khususnya di Gampong Labuhan Bakti masih sangat sederhana, sehingga pemerintah pernah merehab puluhan rumah di Kecamatan Teupah Selatan termasuk di Gampong Labuhan Bakti.

Adapun sarana prasana lain yang ada di Gampong Labuhan Bakti cukup lengkap, diantaranya seperti sarana peribadatan yang terdiri dari dua unit Masjid, empat unit meunasah, tiga unit TPA. Sarana pendidikan cukup memadai terdiri dari satu unit SMA N Teupah Selatan, satu unit SMP N 1 Teupah selatan, satu unit MIS Darul Maarif, satu unit SD N 6 Teupah Selatan, satu Unit TK Melati. sarana kesehatan dapat dikatakan cukup memadai dimana tersedia satu puskesmas. Sarana olahraga yang sudah ada yaitu lapangan voli dan lapangan bola kaki. Sarana bagi nelayan juga ada yaitu tempat pelelangan ikan dan pangkalan pendaratan ikan. Dan juga masyarakat Gampong Labuhan Bakti memiliki satu unit pasar.

Tabel 4.8. Sarana Prasarana Gampong Labuhan Bakti

No	Nama fasilitas	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Fasilitas agama		
	• Mesjid	2 Unit	Aktif
	• Meunasah	4 Unit	Aktif
	• TPA	3 Unit	Aktif
2	Fasilitas Pendidikan		
	• SMA	1 Unit	Aktif
	• SMP	1 Unit	Aktif
	• MIS	1 Unit	Aktif
	• TK	1 Unit	Aktif

⁸Hasil Wawancara dengan Muhammad Yayan. Camat Teupah Selatan, tanggal 27 Juni 2018.

3	Fasilitas kesehatan • Puskesmas	1 Unit	Aktif
4	Fasilitas Olahraga • Lapangan bola volly • Lapangan bola kaki	1 Unit 1 Unit	Aktif Aktif
5	Fasilitas nelayan • Tempat pelelangan ikan • Pangkalan pendaratan ikan	1 Unit 1 Unit	Aktif Aktif
6	Pasar Labuhan Bakti	1 Unit	Tidak permanen

Sumber: Dokumentasi data Sekunder di kecamatan Teupah Selatan dan pengamatan penulis terhadap lokasi penelitian.

Sarana yang tersedia tersebut dikelola oleh lapisan pemimpin setempat serta mendapat dukungan yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, salah satunya sangat tampak dari sektor keagamaan, dengan kerjasama dan motifasi keimanan yang tinggi, seperti gotong royong tokoh masyarakat beserta semua lapisan masyarakat membersihkan mesjid guna untuk selalu menjaga kebersihan dimana tempat masyarakat melakukan shalat lima waktu. Kemajuan dan semangat kerjasama lainnya juga tampak dari kekompakan generasi muda dalam memanfaatkan prasarana dan sarana olah raga yang di koordinir oleh desa. Sampai tahap tertentu, manajemen pemerintahan Gampong sudah berjalan sebagaimana mestinya.

5. Sejarah Wisata Gampong Labuhan Bakti

Asal usul nama Pantai Thailand sendiri berasal ketika selat ini digunakan sebagai dermaga bagi para orang Thailand untuk mengangkut batang kayu kenegara asalnya. Warga setempat pun akhirnya mengenal tempat tersebut dengan sebutan Camp Thailand. Namun sebelum peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004, seiring dilarang aksi penebangan liar mulai berkurang kapal-kapal besar bersandar dan warga Negara Thailand meninggalkan camp tersebut

serta mengeletakkan kayu-kayu yang tersisa. Sejak saat itulah, pantai indah ini dikenal dengan nama Pantai Thailand.⁹

Namun setelah tsunami pantai Thailand semakin banyak yang berkunjung untuk berwisata. Seiring waktu berjalan masyarakat setempat pun mulai membuka warung, membuat pondok-pondok di pantai ini. sehingga daya tarik wisatawan untuk berkunjung semakin besar. Ditambah lagi semenjak dibangunnya jembatan merah.

Hal ini diakui oleh Bapak Muhammad Yayan menurut pengakuannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue membangun jembatan di hutan mangrove. Jembatan ini dibangun selain menjadi objek wisata, juga untuk mencegah perambahan hutan mangrove di pinggir pantai. Jembatan yang berwarna merah ini dibangun sepanjang 1000 meter dari material kayu di kawasan pantai Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue. selesai dikerjakan sepanjang 400 meter sejak akhir tahun 2015 lalu. Selain jembatan yang menebus hutan bakau dan rawa-rawa, juga dibangun sejumlah fasilitas umum, perkantoran dan rumah makan. Bangunan ini dibangun dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dengan anggaran Rp. 2.5 miliar.¹⁰

Tujuan pembangunan jembatan ini di hutan mangrove untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat memiliki kesadaran agar tidak merambah mangrove. Serta menjadi pusat penelitian biota air laut dan tawar.

⁹Wawancara dengan Bapak Arif Antonio, kapid Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan, pada tanggal 21 Juni 2018.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 25 Juni 2018.

Serta fasilitas ini bisa menjadi pusat penelitian kelautan dan perikanan nantinya. Menurut pengakuan bapak Muhammad Yayan wisata jembatan merah ini telah menjadi aset Kecamatan Teupah selatan, namun tetap di fasilitasi Pemerintahan Kabupaten Simeulue.¹¹

Adapun fasilitas yang tersedia di pantai Labuhan Bakti terbilang cukup lengkap, disekitarnya terdapat beberapa pondok-pondok yang bisa digunakan wisatawan untuk beristirahat. Selain itu sudah tersedia pula fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir yang luas, mesjid untuk beribadah bagi umat muslim, puskesmas, dan lain-lain. Disekitaran pantai ini juga bisa ditemukan berbagai warung yang menjual makanan mulai dari makanan ringan hingga olahan seafood termasuk di dalamnya olahan lobster, bahkan bukan hanya itu saja pantai Labuhan Bakti ini juga memiliki keistimewaan dimana warna pasirmnya yang berbeda-beda yaitu pasir putih dan pasir merah sehingga mengundang ketertarikan para pengunjung.¹²

Selain itu juga gampong labuhan bakti ini dekat dengan pulau batu berlayar sehingga jika ada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di gampong labuhan bakti dan juga ingin berkunjung ke pulau batu berlayar dapat meminta bantuan kepada masyarakat setempat untuk mengantarkan para wisatawan ke pulau batu berlayar dengan perahu, hal ini juga dapat membantu menambah pendapatan masyarakat setempat.

Wisata Labuhan Bakti juga selalu ada pemantaun baik pemantauan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) dan mengfungsikan Limnas Gampong

¹¹Wawancara dengan Bapak Muhammad yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 25 Juni 2018.

¹²Hasil Pengamatan Peneliti terhadap Lokasi Penelitian Pada tanggal 20 juni 2018.

Labuhan Bakti. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Arif Antonio bahwa pemantauan terhadap objek wisata selalu dilakukan, para petugas lapangan dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan langsung turun lapangan.¹³ Hal ini juga diakui oleh bapak Muhammad Yayan menurut pengakuannya Koordinasi selalu dilakukan baik dengan Pak Bupati, pihak dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maupun dengan Sekda, koordinasi ini tidak hanya dilakukan di Gampong Labuhan Bakti saja namun juga dilakukan di 19 Desa lainnya yang ada di Kecamatan Teupah Selatan.¹⁴

Adapun untuk menuju ke pantai ini wisatawan harus melakukan perjalanan selama satu jam dari kota Sinabang. Namun jika wisatawan berasal dari luar kota, maka dapat menempuh dua jalur dengan terlebih dulu menuju ke pelabuhan Labuhan Haji di Aceh Selatan, lalu menyebrang ke Pelabuhan Sinabang, jika ingin perjalanan yang lebih cepat wisatawan bisa menggunakan jalur udara dengan mendarat di Bandara Lasikin yang letaknya 12 kilometer dari kota Sinabang.

B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Gampong Labuhan Bakti

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya. Masyarakat pesisir adalah

¹³Wawancara dengan Bapak Arif Antonio, kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pada tanggal 21 Juni 2018.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Muhammad yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 25 Juni 2018.

sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Sebahagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung seperti menangkap ikan dan pembudidayaan terumbu karang maupun tidak langsung seperti pemanfaatan pantai sebagai objek wisata.¹⁵

Kehidupan ekonomi masyarakat gampong Labuhan Bakti masih sederhana dimana masyarakat masih sangat bergantung dengan profesi nelayan, petani, pedagang, dan lain-lain. Terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bakti, berikut dijelaskan item-item yang menjadi tolak ukur kehidupan ekonomi suatu daerah yang terdiri dari:

1. Pekerjaan dan pendapatan

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian pokok.

¹⁵Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: LISPI, 2010), hal. 11.

Sedangkan pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Adapun mata pencarian masyarakat Gampong Labuhan Bakti tersusun dari kelompo-kelompok yang beragam seperti berikut ini:

a. Nelayan

Adapun masyarakat yang berprofesi nelayan ini terbagi menjadi beberapa kategori:

- Masyarakat nelayan tangkap

Masyarakat nelayan tangkap merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.

Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya. Adapun pendapatan yang dihasilkan masyarakat nelayan tangkap tradisional dan nelayan tangkap modern berbeda dikarenakan nelayan tangkap tradisional masih menggunakan perahu kecil untuk alat transportasinya dalam penangkapan ikan sehingga tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang jauh, sehingga ikan yang di dapat pun tidak terlalu banyak di tambah lagi jika kondisi cuaca kurang mendukung bisa-bisa masyarakat nelayan tradisional ini tidak mendapatkan ikan untuk di jual hanya saja cukup untuk dibawah pulang kerumah.

Adapun pendapatan nelayan tangkap tradisional ini perhari 70.000-100.000 ribu tergantung hasil ikan yang di tangkap dan hasil penjualannya, karena mereka menjual ikan tersebut kepada masyarakat Gampong jika para pedangan ikan keliling mendahului mereka dalam menjual ikan maka ikan-ikan yang mereka tangkap hanya sebahagian saja yang laku bahkan jika ada agen-agen di pasar gampong yang menampung ikan tersebut dengan harga yang murah. Dan pendapatan masyarakat tangkap Tradisional ini juga berkegantungan dengan kondisi cuaca, apabila kondisi cuaca tidak mendukung melaut maka mereka tidak mendapatkan pendapatan apapun selama kondisi cuaca tidak mendukung, namun dari beberapa nelayan ada yang mempunyai pekerjaan sampingan seperti membantu istri-istri mereka berjualan di pesisir pantai atau objek wisata bagi yang mempunyai usaha di objek wisata. Dan ada juga masyarakat nelayan yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan sampingan, jika mereka tidak melaut maka mereka hanya mengandalkan penghasilan yang di dapat sebelumnya untuk kebutuhan ekonomi dengan menghemat-hematkan.

Sedangkan pendapatan masyarakat tangkap nelayan modern ini dikatakan lebih banyak dari pendapatan masyarakat nelayan tradisional dikarenakan alat transportasi mereka dalam penangkapan ikan memakai perahu-perahu besar yang sudah berubin dan mereka memakai alat-alat modern dalam penangkapan ikan. Sehingga wilayah-wilayah yang ingin mereka dijangkau dapat terjangkau dan hasil penangkapan ikan yang mereka dapat pun banyak. Masyarakat nelayan modren ini juga menjual ikan hasil

tangkapan mereka ke kota sehingga harga ikan tersebut berbeda dengan harga penjualan ikan di gampong, mereka menjual ikan ke kota langsung dari jalan laut sehingga sewaktu pulang mereka dapat memancing ikan untuk di bawah pulang dan apabila hasil tangkapan mereka banyak bisa di jual lagi kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian mereka mendapatkan penghasilan lebih banyak. penghasilan masyarakat nelayan tangkap modern ini perharinya mencapai 400.000 ribu

- Masyarakat nelayan buruh

Masyarakat nelayan buruh merupakan kelompok nelayan yang tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh atau anak buah kapal pada kapal-kapal besar dan biasanya mereka ini tidak perorangan melainkan berkelompok dalam satu kapal. Kelompok masyarakat nelayan buruh ini melaut dengan jangkauan wilayah yang jauh dan mereka tidak hanya menangkap ikan dengan memancing akan tetapi juga mereka menangkap ikan dengan menggunakan penembak ikan dengan cara menyelam. Dengan menyelam mereka menembak ikan, menembak gurita, dan menangkap tripang menggunakan tangan langsung dan ada juga sebahagian nelayan melakukan penangkapan dengan menggunakan tombak. Adapun pendapatan masyarakat nelayan buruh ini dalam 2 minggu mencapai 800.000-1000.000 ribu.

b. Bengkel

Masyarakat Gampong Labuhan Bakti yang berprofesi bengkel hanya 2 orang dan usaha bengkel ini cukup berkembang dikarenakan di Gampong

Labuhan Bakti cuma ada dua usaha bengkel, jadi seluruh masyarakat labuhan bakti akan memperbaiki kendaraan mereka di bengkel tersebut. Adapun pendapatan mereka tergantung pada orang yang datang memperbaiki sepeda motornya dikarenakan pendapatan mereka perharinya berbeda-beda.

c. Penjahit

Masyarakat yang berprofesi penjahit di gampong labuhan bakti ada 3 orang. Adapun pendapatan yang di dapat perharinya tidak menentu tergantung banyak nya orang yang datang menjahit baju. Dan biasanya mereka hanya menerima pesanan yang di jahit seperti mengecilkan pakaian saja. Dikarenakan para penjahit di gampong labuhan bakti sudah tua jadi mereka tidak berani menerima jahitan baju karena penglihatan mereka sudah mulai kabur dan juga mereka tidak menguasai tentang pola pakaian yang ingin dijahit dan mereka takut nanti hasil nya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Adapun harga satu baju yang dikecilkan hanya 10.000-15.000 ribu tergantung pakaian yang ingin di kecilkan.

d. PNS

Masyarakat Gampong Labuhan Bakti yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 60 orang. Pendapatannya tergantung golongan yang telah di tentukan, dan PNS di Gampong Labuhan Bakti kehidupan mereka sudah sejahterah.

e. Pedagang

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Gampong Labuhan Bakti ini ada pedagang di dataran atau di jalan raya, pedagang ikan keliling

dan Pedagang yang membuka usaha di pesisir pantai atau objek wisata ini umumnya masyarakat yang memang tinggal di daerah pesisir Gampong Labuhan Bakti, dan ada juga sebahagian masyarakat yang bertempat tinggal di dataran membuka usaha di pesisir pantai atau objek wisata. Adapun jenis usaha masyarakat yang dibuka di objek wisata ialah membuka warung makan, warung kopi, jual sovnrir, pondok-pondok, dan lain-lain. dan jenis-jenis jualan yang mereka jual ialah ikan bakar, mie kepiting, mie lobster, bakso, kelapa muda, berbagai minuman, dan lain-lain.

Berdasarkan pengakuan dari ibu Alonta bahwasanya keluarganya membuka usaha warung makan sudah dari 4 tahun yang lalu dan 1 tahun dari belakang mereka mulai membuat beberapa pondok-pondok di pesisir pantai atau objek wisata untuk menarik perhatian para pengunjung, dan usaha ini merupakan pekerjaan pokok keluarga ibu Alonta. Penghasilan perhari yang di dapat ibu alonta 300-450 ribu tergantung banyak nya pengunjung yang datang ke warungnya dan pada hari minggu dan hari sabtu pendapatan ibu Alonta bisa bertambah dikarenakan hari libur pengunjung semakin banyak.¹⁶ Adapun ibu Alonta ini seorang janda yang di tinggal cerai suaminya dan memiliki dua orang anak, anak pertama tinggal dengan suaminya dan anak kedua tinggal bersama nya. Setelah dia bercerai dengan suaminya ibu Alonta tinggal bersama orang tuanya dan membantu usaha orang tuanya dalam berdagang di pesisir pantai.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Alonta, pedagang di Objek Wisata, pada tanggal 22 Juni 2018.

Pengakuan ibu Alonta juga sama dengan pengakuan ibu Khairani bahwasanya ibu Khairani membuka usaha warung kecil-kecilan di objek wisata ini sudah 2 tahun yang lalu disana ibu Khairani menjual mie goreng, mie bokom, dan berbagai minuman. Usaha ini juga merupakan sumber utama mata pencarian keluarga ibu Khairani. Penghasilan ibu Khairani dalam sehari mencapai 250 ribu tergantung banyaknya pengunjung dan juga jenis-jenis makanan yang di jual ibu Khairani tidak terlalu banyak. Dari penghasilan inilah mereka membiayai kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak-anaknya.¹⁷Ibu Khairani kesehariannya berjualan di objek wisata, sedangkan suaminya bekerja sebagai guru honor di SD Gampong Labuhan Bakti. Penghasilan yang dihasilkan suami ibu Khairani tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka belum lagi dengan membiayai pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka memutuskan untuk membuka warung kecil-kecilan di objek wisata. setelah mereka membuka usaha di objek wisata, penghasilan yang di dapat cukup membiayai kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anaknya.

Wawancara lainnya dengan pedagang di objek wisata pantai Gampong Labuhan Bakti juga mengatakan bahwa usaha mereka di bjek wisata merupakan mata pencarian pokok bagi keluarga dan sebahagian masyarakat yang berjualan di pesisir pantai jika ada acara-acara besar yang dilakukan di Gampong Labuhan Bakti maka masyarakat yang tidak tinggal di pesisir dan masyarakat luar Gampong Labuhan Bhakti akan berdagang di objek wisata. Adapun kegiatan-

¹⁷Wawancara dengan Ibu Khairani, pedagang di Objek Wisata, pada tanggal 22 Juni 2018.

kegiatan besar kecamatan sering diadakan di Gampong Labuhan Bakti ini karena Gampong Labuhan Bakti merupakan ibu kota Kecamatan Teupah Selatan.

Hal ini diungkapkan oleh ibu Gudau menurut pengakuannya

*“ Ao bejualan ek ere ngang 3 tahun la ±, sia mai jual ya nga nae totong, pop mie, kopi, saa sagalo tot wek minuman. Rato-rato saa sia bejualan ek ere samo masarek jualan da. Kalau kepeng sia dapek tiok balal daimang la nga mang dapek 300 ribu tapi anga ise alek acara sebel-sebel ui siuk 17 agustus ere afel dapek diamai. (saya berjualan disini sudah 3 tahun ±, yang kami jual ada ikan bakar, pop mie, kopi, dan berbagai minuman. Rata-rata yang berjualan disini jenis yang dijual sama semua. Pendapatan yang didapat perhari mencapai 300 ribu tapi jika ada acara-acara besar yang diadakan di Gampong Labuhan Bakti seperti acara 17 Agustus yang akan datang ini pendapat yang didapat lebih banyak dari pendapat yang biasa didapat perharinya)”*¹⁸

f. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Masyarakat tani gampong Labuhan Bakti melakukan cocok tanam dalam 1 tahun 2 kali, mulai dari pembibitan sampai dengan panen. Hasil panen padi akan dijual dan digunakan untuk kebutuhan ekonomi. Padi yang dijual masih berbentuk padi dan padi yang sudah menjadi beras, adapun padi yang dijual sistem penjualannya pernali, dalam 1 nali seharga 60-80 ribu, sedangkan sistem penjuanaan padi yang sudah diolah menjadi beras, sistem penjualannya perbambu, dalam 1 bambu seharga 13-15 ribu. Dari hasil penjualan padi inilah

¹⁸Wawancara dengan Ibu Gudau, penjual di objek wisata, pada tanggal 22 Juni 2018.

mereka membiayai kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya.¹⁹

hasil panen masyarakat tani padi tahun ini tidak maksimal atau gagal panen dikarenakan salanya prediksi waktu yang cocok bertani. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yayan menurut pengakuannya rata-rata masyarakat Teupah Selatan gagal panen padi karena bukan pada waktunya bercocok tanam dan tidak serentak ada yang sudah bercocok tanam dan ada yang baru memulai dan juga terjadi kemarau panjang.²⁰

Tabel 4.9. Profesi Masyarakat Gampong Labuhan Bakti

No	Profesi	Jumlah Penduduk
1	Nelayan	132
2	Bengkel	2
3	Penjahit	3
4	PNS	60
5	Pedagang	45
6	Petani	130

Sumber Data: Dokumentasi RPJMDES Gampong Labuhan Bakti

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwasanya profesi masyarakat Labuhan Bakti dominan sebagai nelayan. Pak Roslan menyatakan bahwa mata pencarian masyarakat Gampong Labuhan Bakti sebagai nelayan dan petani. Selain pekerjaan pokok, masyarakat Gampong Labuhan Bakti mulai mencari pekerjaan alternatif yang tidak tergantung pada aktivitas melaut dan bertani, karena ketika cuaca buruk maka masyarakat nelayan tidak dapat melaut sehingga tidak memiliki pendapatan dan begitu juga jika datang musim kemarau panjang masyarakat tani tidak dapat turun

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Mansyur, selaku Tokoh masyarakat dan juga petani di Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 30 juni 2018.

²⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 21 Juni 2018.

kesawah sehingga tidak mendapat pendapatan karena tidak ada hasil padi yang dijual mala mengeluarkan dana untuk membeli beras”²¹.

Hasil wawancara dengan Keuchik menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Labuhan Bakti masih sangat terikat dengan aktivitas melaut dan bertani sebagai pekerjaan pokok masyarakat, baru beberapa tahun terakhir masyarakat mulai mencari pekerjaan alternatif seperti berdagang di pesisir pantai Gampong Labuhan Bakti.

Tabel4.10.Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Pencari Kerja		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15-19	-	-	-
2	20-24	10	5	15
3	30-44	6	8	14
4	45-54	-	-	-
Jumlah		16	13	29

Sumber Data: Dokumentasi RPJMDES Gampong Labuhan Bakti

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa pencari kerja menurut kelompok umur yang paling banyak umur 20-24 tahun, selanjutnya umur 30-44 tahun.

Tabel4.11.Pencari kerja Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD dan Tidak tamat SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	10	5	15
4	DIPLOMA	4	4	8
5	Sarjana/Pasca sarjana	6	5	11
JUMLAH		20	14	34

Sumber Data: Dokumentasi RPJMDES Gampong Labuhan Bakti

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa pencari kerja tingkat Pendidikan yang paling banyak tingkat pendidikan SLTA sebanyak 15 orang, selanjutnya pendidikan Sarjana/ Pasca sarjana sebanyak 11 orang, dan terakhir Diploma sebanyak 8 orang.

²¹Wawancara dengan Bapak Roslan, Keuchik Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 21 Juni 2018.

2. Kesejahteraan masyarakat Gampong Labuhan Bakti

sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Masyarakat gampong Labuhan bakti dikatakan masih sosial ekonomi lemah, namun sudah mulai sudah mulai terlihat peningkatannya, dimana setiap tahapnya penerima raskin semakin berkurang dan dimana juga dilihat dari usaha-usaha masyarakat sudah mulai berkembang sehingga pendapatan pun semakin meningkat, didukung dengan adanya fasilitas kesehatan yang sudah memadai, sudah banyak nya orang tua yang mulai mengutamakan pendidikan anak-anaknya.

Walaupun masyarakat Labuhan Bakti ini pernah mengalami sebuah permasalahan mengenai pendidikan dimana pada tahun belakang ini tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi yang menjadi utamanya ialah mahal nya biaya pendidikan membuat masyarakat yang kurang mampu (miskin) tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.²²

Namun pada saat ini masyarakat labuhan bakti sudah mulai terlihat mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Hal ini diakui oleh pak Roslan menurut pengakuannya kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah mulai terlihat dalam masyarakat gampong Labuhan Bakti, dimana sudah banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi seperti ke Banda Aceh

²²Dokumentasi RPJMDES tahun 2018.

dan Meulabo. Apalagi saat ini banyak siswa yang mendapatkan bantuan Bidikmisi yang biaya kuliahnya ditanggung oleh pemerintah.²³

C. Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Tambah strategi usaha-usaha besar akan sukar dicapai. Maka dari itu pemerintah memiliki beberapa strategi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat gampong Labuhan Bakti.

Menurut pengakuan Pak Roslan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).²⁴ Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Kelembagaan

Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

²³Wawancara dengan Bapak Roslan, Keuchik Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 22 Juni 2018.

²⁴Wawancara dengan Bapak Roslan, Keuchik gampong labuhan Bakti, pada tanggal 25 juni 2018.

2. Pendampingan

Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

3. Dana usaha produktif bergulir

Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

Ada pun strategi pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat labuhan bakti ialah:

1. Pengembangan Mata Pencarian Alternatif

Mata pencaharian alternatif merupakan sebuah usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Pengembangan mata pencarian alternatif dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa sumber daya masyarakat Gampong Labuhan Bakti secara umum telah banyak mengalami penurunan, karena masyarakat Gampong Labuhan Bakti umumnya bermata pencarian nelayan yang bergantung dengan kondisi cuaca dan hasil tangkap, masyarakat nelayan yang tidak mengetahui bagaimana cara mengelolah hasil tangkap selain di jual, sehingga hal ini membuat masyarakat itu sendiri sulit untuk sejahtera.

Pengembangan mata pencaharian alternatif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut dapat diminimalisasi dan diberikan kesempatan untuk merehabilitasinya sendiri secara alami. Oleh karena itu, desain pengembangannya harus mengikuti sistem sumberdaya yang ada di kawasan pengembangan. Segenap informasi terkait dengan upaya pengembangan mata pencaharian alternatif harus digali secara komprehensif dan menyeluruh agar rekomendasi pengembangannya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia serta kemampuan kawasan untuk menunjang kegiatan tersebut.

Melalui program ini pemerintah kabupaten simeulue menjalin kerja sama dengan pihak kecamatan dan pihak Gampong labuhan Bakti dalam memberikan berbagai jenis pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat untuk mengembangkan mata pencarian alternatif. Adapun pelatihan dan pendampingan yang sudah perna dilakukan ialah pelatihan dan pendampingan masyarakat petani, pelatihan dan pendampingan masyarakat nelayan, dan pendampingan kepada seluruh masyarakat gampong Labuhan Bakti.

a. Pelatihan dan pendampingan masyarakat petani

Pelatihan ini diadakan setiap 1 tahun 2 kali yang diadakan di balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat dan pelatihan ini dihadiri seluruh masyarakat petani Gampong Labuhan Bakti. Dalam pelatihan ini juga dibentuk kelompok-kelompok usaha bersama sesuai dengan usaha alternatif yang akan dikembangkan. Pemerintah kabupaten, pihak kecamatan, dan pihak tokoh masyarakat gampong Labuhan Bakti melakukan pendampingan secara berkelanjutan dan menggunakan tenaga lapangan yang bertugas sejak awal pelatihan karena mereka telah membaaur dan dikenal oleh masyarakat sehingga hasil yang diharapkan lebih efektif dan efisien.

Hal ini juga diakui bapak Safrian Mr pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat tani selalu dilakukan dalam 1 tahun 2 kali dalam pelatihan tersebut masyarakat diajarkan mulai dari tahap awal pengolahan tana, proses membersihkan rumput dan kotoran yang mengganggu pertumbuhan padi, tahap pemupukan, proses penanaman, dan sampai proses akhir.²⁵

Dengan adanya pelatihan ini sangat membantu masyarakat petani dalam hal menghindari kegagalan panen. Hasil panen padi dapat dijual sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan keperluan lainnya.

b. Pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat nelayan

²⁵Hasil wawancara dengan bapak Safrian Mr Kaur Program Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 21 juni 2018.

Ada beberapa pelatihan yang di lakukan untuk masyarakat nelayan yang pertama: pelatihan cara mengolah ikan mentah menjadi ikan asin sehingga ikan yang tidak laku dijual tidak hanya dibuang atau dibagikan ke tetangga. Dengan mengolah menjadi ikan asin dapat di jual kembali dan juga dapat bertahan lama apabila tidak langsung laku pada saat dijual. Kedua: para nelayan dapat menjadi pengantar (*guide* wisata) apabila kondisi cuaca tidak mendukung untuk melaut nelayan bisa menjadi pemandu bagi para wisatawan luar yang berkunjung dan memberi informasi mengenai tempat wisata yang akan dikunjungi para wisatawan. Ketiga: nelayan bisa menyewakan perahunya kepada wisatawan yang ingin berpergian kepulauan-pulau kecil terdekat Gampong Labuhan Bakti, misalnya pulau batu belayar.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada nelayan dapat membantu mengurangi ketidak mampuan membiayai kebutuhan ekonomi dikarenakan penghasilan yang di dapat pas-pasan, dan adanya pelatihan ini nelayan tidak hanya bergantung dengan cuaca dan hasil tangkap yang di dapat akan tetapi jika cuaca tidak mendukung nelayan dapat mencari alternatif lainnya seperti yang di jelaskan diatas begitu juga jika hasil tangkap yang di dapat tidak semua laku ikan-ikan tersebut tidak terbuang akan tetapi dapat di olah menjadi ikan asin. Dengan begitu dapat menjadi penambahan pendapatan bagi keluarga nelayan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

c. pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat

Pelatihan dan pendampingan kepada seluruh masyarakat Gampong Labuhan Bakti dengan mengumpulkan seluruh masyarakat di balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat. Ada beberapa pelatihan yang dilakukan ke pada masyarakat, yang pertama: dibentuk kelompok usaha bersama misalnya usaha kelompok tani, kelompok pengrajin, dan kelompok lainnya sesuai dengan usaha alternatif yang akan dikembangkan, adapun tujuan dibentuknya kelompok-kelompok ini dalam masyarakat ialah memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha alternatif yang dikembangkannya. Kedua: Memanfaatkan cadangan dana bantuan pinjaman modal dari pemerintah untuk usaha kecil dan menengah atau ekonomi kerakyatan secara optimal dari pemerintah. Ketiga pelatihan pengembangan mata pencarian alternatif dalam berdagang atau membuka warung di pesisir pantai dan membuka home industri.

2. Akses Terhadap Modal

Akses terhadap modal sangat penting bagi masyarakat Gampong Labuhan Bakti karena dengan adanya Ketersediaan informasi modal dapat membantu masyarakat dalam mempermudah dan memperlancar proses peningkatan modal usaha yang ingin dikembangkannya. Peningkatan modal usaha masyarakat akan berdampak meningkatnya kinerja usaha yang mereka kembangkan dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Semakin sering masyarakat mampu memperoleh/mengakses informasi modal maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk meningkatkan modal usaha yang mereka kembangkan.

Adapun pada dasarnya masyarakat gampong Labuhan Bakti sangat sulit untuk memperoleh informasi modal. Keterbatasan kemampuan masyarakat gampong Labuhan Bakti dalam memperoleh informasi modal disebabkan oleh kurangnya informasi tentang lembaga-lembaga pemberi kredit yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan modal dalam kegiatan usaha yang mereka kembangkan.

Keterbatasan ini mengakibatkan masyarakat Gampong Labuhan Bakti melakukan kegiatan usaha yang mereka kembangkan hanya sebatas modal yang mereka miliki. Ini juga mengakibatkan rendahnya kreativitas dan keinginan mereka dalam mengadopsi inovasi baru. Rendahnya kreativitas dan keinginan untuk menerapkan inovasi baru nantinya akan dapat menurunkan kinerja usaha mereka. Agar kreativitas dan keinginan masyarakat untuk mengadopsi inovasi baru meningkat maka akses informasi modal sangat perlu di sediakan bagi masyarakat Gampong Labuhan Bakti.

Oleh karena itu pemerintah kabupaten simeulue memudahkan masyarakat dalam memperoleh modal usaha dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan memudahkan persyaratan dalam mengambil pinjaman modal atau kredit usaha masyarakat.

3. Akses Terhadap Teknologi

Teknologi adalah bentuk kreasi dari manusia yang diwujudkan dengan alat, dan teknik tertentu sehingga dapat mempermudah suatu pekerjaan dalam

menghasilkan sesuatu. Teknologi juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan dan penerapan pengetahuan tentang alat-alat, teknik, metode atau sistem organisasi atau pun produk sebagai hasil akhir.

Teknologi sendiri saat ini telah menjadi suatu trend, style, dan gaya hidup bagi kita. Bahkan teknologi saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Hal ini bisa di lihat dari orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan mereka sehari-hari yang selalu memanfaatkan teknologi untuk segala kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan tujuan untuk membantu, mempermudah, dan mempercepat itu semua, bahkan kita sendiri pun demikian.

Teknologi juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Dengan adanya teknologi dapat membantu masyarakat dalam memperlancar dan mempermudah mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka, semakin sering masyarakat mampu memperoleh atau mengakses informasi teknologi maka semakin mudah proses kegiatan usaha yang mereka jalani dan hasilnya pun akan semakin baik.

Hal serupa juga sangat diharapkan oleh masyarakat Gampong Labuhan Bakti. Mereka sangat mengharapkan adanya informasi tentang penggunaan teknologi-teknologi tepat guna sesuai kebutuhan mereka dan mudah dalam penerapannya. Disamping itu diharapkan informasi tersebut mampu terakses oleh mereka.

Adapun pada dasarnya tingkat pengaksesan informasi teknologi pada masyarakat gampong Labuhan Bakti masih sangat sulit dan hanya sebahagian

masyarakat kecil saja yang sudah mengetahui fungsi-fungsi teknologi dan pengaksesannya untuk kehidupan. Teknologi yang digunakan masyarakat masih bersifat tradisional, misalnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mempromosikan usahanya melalui media sosial. Sebagian besar masyarakat Gampong Labuhan Bakti masih belum mengetahui akses mendapatkan informasi. Dengan ketidak tahuan ini membuat usaha yang mereka kembangkan tidak berkembang dan mengakibatkan pendapatan yang di dapat menjadi rendah.

Oleh karena itu upaya dalam meningkatkan pendapatan dilakukan melalui meningkatkan teknologi. Dengan adanya informasi teknologi masyarakat dapat lebih mudah mengembangkan usaha-usaha mereka, misalnya informasi teknologi bidang pertanian, bidang kelautan, bidang wirausaha, dan lain-lain. Dengan adanya ini semua masyarakat Labuhan Bakti khususnya masyarakat yang berjualan di objek wisata dapat mempromosikan wisata beserta dagangan mereka ke media sosial. Sehingga semakin banyak yang tertarik untuk mendatangi objek wisata Labuhan Bakti.

4. Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah tempat Proses hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ciri khas sebuah pasar adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya

Pasar di Gampong Labuhan Bakti sudah ada dari dulu namun pasar tersebut kurang berkembang. Oleh karena itu membuka akses pasar adalah cara

untuk mengembangkan usaha karena jika tidak ada pasar maka usaha-usaha masyarakat sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat membantu berjalannya dan berkembangnya pasar tersebut.

5. Pengembangan aksi kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.

Pariwisata pantai atau pesisir dapat dikembangkan dengan strategi pembangunan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat, khususnya rasa saling memiliki masa depan bersamadan bekerja sama sehingga mengoptimalkan kualitas dan kuantitas jaringan, komunikasi, inisiatif, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta kelestarianlingkungan hayati.

Oleh karena itu Pemerintah memberikan penambahan Modal kepada masyarakat gampong Labuhan Bakti, dana ini cukup membantu modal usaha masyarakat. Hal ini juga diakui oleh bapak safrian Mr penambahan modal masyarakat labuhan Bakti juga diberikan melalui dana desa yang disalurkan

kepada masyarakat miskin, dan dana ini diterapkan sebagai dana bergulir dimana masyarakat diberi pinjaman dana untuk membuka usaha yang ingin dikembangkannya dan masyarakat wajib mengembalikan dana tersebut dan akan diberikan kepada masyarakat lain yang juga membutuhkan.²⁶

Pengakuan bapak Safrian juga didukung dengan pengakuan bapak Muhammad Yayan pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bakti melalui dana desa yang akan diberikan kepada masyarakat dan dana tersebut dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ada yang membuka usaha di pesisir pantai, ada yang membuka usaha peternakan, ada masyarakat yang membeli perlengkapan kelaut, dan lain-lain. dengan tujuan untuk menambah pendapatan perkapita masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁷

Hal ini senada dengan pengakuan ibu Rina selaku penerima modal menurut pengakuannya salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat Labuhan Bakti ialah berupa tambahan modal untuk para penjual di pinggir pantai.²⁸ Ibu rina seorang janda yang di tinggal meninggal oleh suaminya sejak 2 tahun yang lalu dan mempunyai 2 orang anak. Dari modal yang diberikan oleh Pemkab Simeulue ibu Rina membuka usaha jualan di objek wisata Labuhan Bhakti ibu rina menjual mie bakso dan mie goreng, serta minuman.

²⁶Hasil wawancara dengan bapak Safrian Mr Kaur Program Gampong Labuhan Bakti tgl 21 Juni 2018.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 25 Juli 2018.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rina pedagang di Objek Wisata pada tanggal 3 Juli 2018.

Dari penjelasan ibu Rina sebagai penerima dana tambahan modal, juga dibenarkan oleh bapak Hendri yang juga selaku penerima modal menurut pengakuannya Pemerintah kabupaten Simeulue membentuk kelompok-kelompok dimana setiap kelompok diberikan modal dan juga pelatihan untuk berwirausaha dengan mendirikan warung-warung di pesisir pantai atau objek wisata.²⁹Bapak Hendri membuka warung di objek wisata, di warungnya bapak hendri dan istrinya menjual mie goreng, mie bokom, dan minuman.

Adapun berdasarkan pengakuan Bapak Roslan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi masyarakat pesisir, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar penerima harga, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil dan mendorong munculnya wirausaha baru. Melalui program-program tersebut pemerintah Kabupaten Simeulue Terus memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir sehingga saat ini keadaan ekonomi masyarakat sudah mengalami perubahan ke arah positif.³⁰

Hal ini juga diakui oleh Bapak Darman menurut pengakuannya Sebagai masyarakat yang setiap hari beraktivits di lokasi wisata, kebijakan-kebijakan Pemkab Simeulue dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui wisata pantai sangat terasa bagi mereka, diantaranya pemerintah memberikan hak pengelolaan objek wisata pada pihak Gampong Labuhan Bakti, seperti

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang di Objek Wisata pada tanggal 3 Juli 2018.

³⁰Hasil Wawancara dengan Ruslan, Keuchik Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan, padatanggal 25Juni 2018.

pengelolaan uang masuk dan parkir sehingga menjadi pendapatan Gampong Gampong Labuhan Bakti. Pemerintah juga memberikan pendampingan bagi masyarakat yang melakukan usaha di objek wisata.³¹

Pengakuan Bapak Darman didukung juga dengan pengakuan Bapak Muhammad Yayan, menurut pengakuannya Berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti terus ditingkatkan, program-program tersebut diantaranya dalam membangun berbagai sarana dan fasilitas umum di daerah-daerah pesisir, pemberian pelatihan-pelatihan pada masyarakat dalam membangun ekonomi mikro, perbaikan gizi anak dan mengaktifkan kembali PKK di daerah pesisir yang sudah lama tidak aktif.³²

kebijakan pemerintah akan pengembangan pariwisata pantai atau pesisir yang secara operasional dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan pendekatan kontingensi (sesuai karakteristik geografis dan sosio kultural masyarakatnya). Namun hal ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan benturan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan mengikut sertakan masyarakat setempat dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan pengelolaan kawasan pantai, pesisir dan bahari didukung masyarakat banyak. Salah satu contoh kurang optimalnya kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya alam laut dan pesisir adalah upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menjaga sumberdaya alam laut dan pesisir melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda), terkait hal tersebut. Namun implementasi belum ada mekanisme

³¹Hasil wawancara dengan Darman, Pengelola dan Pemilik Warung di Objek Wisata, pada tanggal 4 Juli 2018.

³²Hasil wawancara dengan Muhammad Yayan. Camat Teupah Selatan, tanggal 27 Juni 2018.

perencanaan dan pengendalian program yang melibatkan peran serta masyarakat setempat secara langsung.

Pemberdayaan masyarakat pesisir harus mengacu pada analisa sosial ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri agar program bisa mencapai tujuan yang diharapkan serta tepat sasaran, karena tanpa itu semua maka setiap program pemberdayaan tidak pernah akan menyentuh sasaran yang diharapkan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir adalah para meter penentuan target dan tujuan yang di formulasikan dalam visi misi program pemberdayaan masyarakat pesisir, kekhasan yang dimiliki kita akan mampu menentukan metode dan strategi yang tepat dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir.

D. Hambatan dan Peluang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Dari tahun ketahun melalui kebijakannya, Pemerintah Kabupaten Simeulue terus berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, bahkan Pemerintah terus menyusun progam baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan, secara garis besar terbagi dua yaitu kendala internal dan eksternal.

1. Kendala Internal

Secara internal Pemerintah Kabupaten Simeulue terkendala dengan keterbatasan anggaran yang tersedia selama ini tidak sebanding dengan

jumlah keluarga miskin yang ada di Kecamatan Teupah Selatan. Sejauh ini Pemerintah hanya memaksimalkan dana yang ada meski pihak pemerintah menyadari masih sangat banyak kekurangan. Selain masalah anggaran, masalah internal lain juga yang dihadapi seperti minimnya media sosialisasi yang digunakan.

Pemerintah Kabupaten Simeulue merasa terkendala dengan sosialisasi berbagai program atau akses informasi kepada masyarakat karena ketersediaan teknologi yang masih minim sehingga sebahagian masyarakat tidak terjangkau informasinya. Banyak masyarakat yang tidak tau informasi terbaru seperti adanya anggaran modal usaha, pemberdayaan kelompok desa atau bantuan modal usaha lainnya yang dapat dijangkau dengan cara mengajukan proposal dari tingkat gampong kepada Pemerintah.³³

Masalah tersebut merupakan masalah internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melakukan berbagai program di lapangan. Masalah ini terus dievaluasi dan tindak lanjuti agar mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Kendala Eksternal

Selain masalah secara kelembagaan atau masalah internal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, juga ada masalah-masalah diluar kelembagaan (Eksternal) terkait realisasi program selama ini seperti kepuasan masyarakat terhadap realisasi program yang dilakukan selama ini, ketidak adanya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan

³³Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2018.

oleh Pemerintah Kabupaten, baik itu bantuan berupa modal usaha uang tunai maupun bantuan seperti robin, jaring, dan perahu bagi nelayan.³⁴

Kendala eksternal lainnya ialah dimana pola pikir masyarakat yang belum kompratif terhadap pariwisata, seperti pembangunan-pembangunan wisata lainnya yang akan di bangun di daerah tersebut namun sebahagian masyarakat tidak mengizinkan tanah mereka untuk dibangun tempat-tempat wisata, dikarenakan mereka berfikir tidak ada keuntungan bagi mereka apabila mengizinkan pemerintah membangun tempat wisata di tanah mereka, justru sebahagian dari mereka berfikir dengan dibangunnya berbagai tempat-tempat wisata di tanah mereka maka mengundang kemaksiatan di Gampong mereka. dengan ketidak setujuan sebahagian masyarakat untuk dibangun tempat wisata di tanah mereka maka pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan.³⁵

Padahal dengan adanya pembangunan tempat wisata di daerah tersebut maka berdampak positif bagi ekonomi masyarakat itu sendiri dan dapat mengurangi pengangguran di Gampong tersebut. Karena dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata maka dapat mengundang wisatawan semakin ramai mengunjungi tempat tersebut, baik wisatawan dari luar daerah maupun wisatan yang ada di daerah Kabupaten Simeulue tersebut dan hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat setempat untuk berjualan,

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yayan, Camat Teupah Selatan, pada tanggal 21 juni 2018.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Antonio, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Simeulue, pada tanggal 20 Desember 2018.

menjadi pemandu, dan kegiatan lainnya yang dapat menguntungkan mereka.³⁶

Hambatan lainnya dimana masyarakat belum mampu memberikan Cindramata kepada wisatawan. Sehingga banyak keluhan-keluhan dari wisatawan, dimana para wisatawan yang dari luar Kabupaten Simeulue pulang tidak mendapatkan Cindramata. Sehingga dengan demikian tempat wisata tersebut jarang dikunjungi oleh wisatawan dari luar Kabupaten Simeulue, dengan demikian juga berdampak bagi prekonomian masyarakat pesisir setempat.³⁷

Kendala lainnya yang ada dimasyarakat ialah cuaca tidak mendukung bagi nelayan untuk melaut sehingga ini menjadi suatu hambatan bagi para nelayan yang ada di Gampong Labuhan Bakti karena tidak dapat melaut hal ini berpengaruh kepada pendapatan para nelayan, dan banyaknya hama dalam pertanian padi, sehingga mengakibatkan gagal panen bagi masyarakat hal ini menjadi suatu hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil panen padi yang memuaskan.³⁸

Berbagai kendala yang dihadapi baik internal amupun eksternal dalam pelaksanaan program merupakan tantangan bagi Pemerintah dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu juga masalah yang dihadapi akan terus menjadi fungsi kontrol Pemerintah dalam merencanakan

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Arif Antonio, KabidDestinasi Dinas Pariwisata dan...,

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Antonio, KabidDestinasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Simeulue, pada tanggal 20 Desember 2018.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Mansyur, Tokoh Masyarakat Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 18 Oktober 2018.

dan menerapkan berbagai program di lapangan sehingga semua perencanaan yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan.

Adapun peluang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir berdasarkan pengakuan bapak Arif Antonio peluang untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir ini dengan cara memberdayakan lokasi masyarakat tersebut, memberikan bantuan-bantuan berupa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk Pariwisata, seperti membangun taman-taman di objek wisata. Pemerintah juga membebaskan pajak bagi masyarakat setempat yang akan berjualan di tempat wisata tersebut, namun bagi masyarakat yang diluar Gampong yang ingin membuka usaha di objek wisata maka harus membayar sewa lapak dan uang tersebut diberikan ke Gampong tempat wisata tersebut.³⁹

Gampong Labuhan Bakti ini dikenal masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai nelayan dan ikan dilaut Gampong labuhan Bakti ini masih terkenal banyak sehingga Pemerintah memberikan bantuan berupa keramba untuk membudidayakan ikan, lobster. Selanjutnya bantuan perahu, jaring, mesin untuk para nelayan dan bibit padi untuk para petani.⁴⁰

Peluang lainnya Dinas Pariwisata akan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk pembuatan sovnrir atau cindramata dari kayu, rotan, anyaman tikar, dan lain-lain dengan mengundang instruktur dari luar. Dinas Pariwisata mengirimkan surat kepada Keuchik yang ada di Kabupaten

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Arif Antonio, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata...,

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Mansyur, Tokoh Masyarakat Gampong Labuhan Bakti, pada tanggal 18 Oktober 2018.

Simeulue khususnya di Gampong yang ada objek wisata bahwasanya agar mengirimkan beberapa orang masyarakatnya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan di Kabupaten. Nantinya masyarakat yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan sudah mampu membuat souvenir maka mereka harus mengajarkan hal tersebut kepada masyarakat lainnya yang ada di Gampong mereka masing-masing. Dengan demikian mereka dapat membuat cindramata dan menjualnya kepada wisatawan dengan adanya cindramata di objek wisata maka dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dan hal ini dapat menguntungkan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya.⁴¹

Selanjutnya Dinas Pariwisata juga membuka kursus bahasa Inggris untuk para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Simeulue yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi untuk dapat mengikuti kursus tersebut, sehingga dapat menjadi penerjemah bagi wisatawan yang datang dari luar. Dengan juga adanya kursus tersebut mereka dapat bekerja di resort-resort yang ada objek wisata maupun penginapan yang ada di Kabupaten Simeulue, sehingga dengan demikian dapat mengurangi pengangguran bagi pemuda-pemudi.⁴²

Berbagai peluang yang terlihat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini terus dikembangkan dan dipantau perkembangannya

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Arif Antonio, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Simeulue, pada tanggal 20 Desember 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Arif Antonio, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata...

oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang mendapati peluang tersebut agar mendapatkan hasil yang mereka harapkan, sehingga dengan demikian juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Kehidupan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue masih tetap berada dalam taraf sosial ekonomi yang sederhana seperti nelayan yang turun ke laut masih mengandalkan alat penangkapan yang masih tradisional.

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan melalui wisata pantai dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, diantaranya adalah kelembagaan, pendampingan wirausaha, dan dana usaha produktif bergulir. Program pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan mata pencaharian alternatif seperti membuka usaha-usaha warung disekitar objek wisata, membuka akses terhadap modal usaha, akses terhadap teknologi (promosi), membuka akses terhadap pasar, serta pengembangan aksi kolektif masyarakat Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan.

hambatan dan peluang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, hambatannya terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, hambatan internalnya ialah Pemerintah Kabupaten Simeulue merasa terkendala dengan sosialisasi berbagai program atau akses informasi kepada masyarakat karena ketersediaan teknologi yang masih minim sehingga sebahagian masyarakat tidak terjangkau informasinya.

Hambatan eksternalnya ialah ketidak adanya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat tidak memberikan izin kepada Pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata di tanah mereka, dan masyarakat belum mampu memberikan cindramata kepada wisatawan. Sedangkan peluangnya ialah Pemerintah membuka kursus bahasa Inggris kepada pemuda-pemudi yang ada di kabupaten Simeulue, Pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk membuat souvenir atau cindramata dari kayu, rotan, anyaman tikar, dan lain-lain dengan mengundang instruktur dari luar. Pemerintah memberikan bantuan berupa keramba untuk membudidayakan ikan, lobster. Selanjutnya bantuan perahu, jaring, mesin untuk para nelayan dan bibit padi untuk para petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa

Saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat pesisir, khususnya masyarakat pesisir di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatanagar melaksanakan dengan baik program pemerintah dengan benar, terutama dalam penggunaan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
2. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Simeulue agar memberdayakan masyarakat pesisir dengan program-program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga program pemberdayaan yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi penyelesaian masalah masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjabana, *Modul Peran Serta Masyarakat dan Swasta Serta Pemuda dalam Pengelolaan dan Pembangunan Kota dalam Manajemen Lingkungan Perkotaan*, Surabaya: Lembaga Penelitian ITS, 2001.
- Ambar S Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Ambo Tuwo, *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.
- Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Cet. Ke-3. Bandung: Armilo, 2001.
- Atmosudirjo S. Prajudi, *Administrasi Manajemen Umum*, Jakarta: CV Mas, 2000.
- Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001.
- BagjaWaluya, *Sosiologi: Menyelami Sosial di Masyarakat*, Jakarta: Pribumi Mekar, 2009.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dahlan Tampubolon, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jurnal SOROT 8 (2) Lembaga Penelitian Universitas Riau ISSN 1907 – 364X, 153 – 161.
- Dahuri R, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Teratur*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas, 2004.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Heru Nugroho, *Industri Pariwisata dalam Perspektif dan Konfigurasi Sistem Dunia*, Yogyakarta: UGM Press, 2002.
- <https://jalanwisata.id/pantai-labuhan-bhakti-simeulue-aceh/>, Wisata Aceh. diakses tanggal 27 Januari 2018
- Lucky Zamzami, *Pemberdayaan Ekonomi Pesisir Pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat*. Skripsi. Jurusan Antropologi Fisip Universitas Andalas Padang, 2011. Skripsi yang dipublikasikan. http://www.academia.edu/30882812/Pemberdayaan_Ekonomi_Masyarakat_Pesisir_di_Nagari_Ampiang_Perak_Sumatera_Barat,
- Kansil, C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Kusnadi, *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Manat Rahim, Madjiani Tahir dan Waly Aya Rumbia, Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilaya Pesisir Dalam menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *Journal The WINNERS*, Vol. 15, No. 1, Maret 2014.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013
- Nikijuluw V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000.

- Rahmawati, *Upaya Pelestarian Biota Laut terhadap Daya Tarik Wisatawan (Turis) di Gampong Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006.
- Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: LISPI, 2010.
- Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*, Yogyakarta: Andi Ofside, 2002.
- Selo oemardjan dan SolemaPn, Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumarti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- Yanuar Fiandana, *Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah(Studi pada Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No. 10, Hal. 1792-1786.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.47/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- imbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- ingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 06 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- etapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
nama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. T. Lembong Misbah, MA (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Dr. Sabirin, S.Sos.I.,M.Si (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Yuliana
NIM/Jurusan : 140404022/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai (Studi di Gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)

- l.a** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
ng : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
apat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
an : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Januari 2019 M
26 Rabi'ul Akhir 1440 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- an:**
x UIN Ar-Raniry.
y) Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
z) mbing Skripsi.
siswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3074/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2018

Banda Aceh, 05 Juni 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, **1. Camat Kecamatan Teupah Selatan Kab. Simeulue**
2. Kepala Dinas UMKM Kab. Simeulue
3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Simeulue
4. Keuchik Labuhan Bhakti
5. Masyarakat Labuhan Bhakti

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Yuliana / 140404022**

Semester/Jurusan : VIII / PMI-Kesos

Alamat sekarang : Jl. Lingkar Kampus

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai (Studi di Gampong Labuhan Bhakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue).*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH SELATAN**

Jln. Batu Berlayar No.Labuhan Bajau 23891
Telp (.....) E-mail teupahselatan@simeulue.go.id

Labuhan Bajau, 22 Juni 2018

Nomor : 470/288/TS/2018
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmia Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Ar - Raniry
di -
Banda Aceh.

Assalamu'alaikum, Wr,Wb

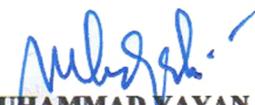
Camat Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yuliana /140404022**
Semester : **VIII / PMI – Kesos**
Alamat : **Jl. Lingkar Kampus**

Benar Yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian Ilmia di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan Judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pasisir Melalui Wisata Pantai”.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, trima kasih.

 **CAMAT TEUPAH SELATAN,**


MUHAMMAD YAYAN, SE
PENATA TK I (III/d)
Nip :19810515 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Baru. Telp. (0650) 7000299Desa. Suka Karya. Sinabang.

Nomor : 556/353/2018

Lamp : -

Hal : *Rekomendasi penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Bapak Kementerian agama Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan
Komunikasi

Di-
Tempat

AssalamualaikumWr. Wb.

Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. SimeulueDengan in menerangkan bahwa :

Nama/Nim : Yuliana
Semester/Jurusan : VII/ PMI-Kesos
Alamatsekarang : Jl. Lingkarkampus

Saudara yang namanya diatas tersebut benar telah melakukan penelitian ilmiah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dengan judul Skripsi “**Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai (Studi di Gampong Labuhan Bhakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue).**”

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
Sinabang, 22 juni 2018
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
kabupatenSimeulue

Abd. Karim, S.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19680828199999031004





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH SELATAN
DESA LABUHAN BAKTI

Jln. Batu Berlayar No. ... Labuhan Bakti 23895
Telepon (.....), E-mail.....

Labuhan Bakti 02 Juli 2018

Nomor : 070 / 269 / LBT / 2018
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmia Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bapak Kementerian Agama Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwa dan
Komonikasi
di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YULIANA / 140404022
Semester : VIII / PMI- Kesos
Alamat sekarang : JL. Lingkaran Kampus

Benar namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmia di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue . dengan judul “ **Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui wisata pantai (studi di gampong labuhan bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue).**”

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Dikeluarkan di : Labuhan Bakti
Pada tanggal : 02 Juli 2018

KEPALA DESA LABUHAN BAKTI

ROSLAN

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara dengan masyarakat Gampong Labuhan Bhakti

1. Bantuan apa saja yang telah ibu/bapak terima dari pemerintah Kabupaten Simeulue?
2. Apa saja jenis-jenis Jualan yang Ibu/Bapak jual di Objek wisata?
3. Berapa pendapatan Ibu/bapak Perhari?
4. Sudah berapa lama ibu/bapak berjualan di objek wisata?
5. Apakah Ibu/bapak Pernah mendapat pelatihan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue?
6. Apakah Pemerintah Kabupaten Simeulue pernah memberikan bantuan modal usaha kepada Ibu/Bapak?

Daftar wawancara dengan keuchik Gampong Labuhan Bhakti

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?
2. Apa apa saja profesi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?
3. Pemberdayaan apa saja yang pernah dilakukan pemerintahan Kabupaten Simeulue?
4. Apakah Pemkab Simeulue membangun sarana dan prasarana penunjang wisata pesisir di Gampong Labuhan Bhakti?
5. Apakah Pemerintah Kabupaten Simuelue membangun kios-kios atau warung-warung untuk masyarakat di objek wisata pesisir?

6. Apakah Pemerintah Kabupaten Simeulue menata objek wisata pesisir di Gampong Labuhan Bhakti?
7. Apakah Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?

Daftar wawancara dengan pihak Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

1. Bagaimana gambaran ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti secara keseluruhan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Teupah Selatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?
3. Bagaimana sinergisitas antara pihak Kecamatan Teupah Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kecamatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?
5. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong Labuhan Bhakti setelah dilakukan upaya pemberdayaan oleh pemerintah.

Daftar wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue

1. Strategi apa saja yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Gampong Labuhan Bhakti?
2. pembanguna sarana dan prasarana apa saja yang telah dilakukan untuk penunjang wisata pesisir di Gampong Labuhan Bhakti?

3. Apa saja faktor pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui wisata pantai di Gampong Labuhan Bhakti?
4. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui wisata pantai di Gampong Labuhan Bhakti?
5. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui wisata pantai di Gampong Labuhan Bhakti?

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Wawancara dengan Keuchik Gampong Labuhan Bhakti.



Gambar 2. Wawancara dengan KAUR Gampong Labuhan Bhakti.



Gambar 3. Wawancara dengan KAUR Gampong Labuhan Bhakti.



Gambar 4. Wawancara dengan Camat dan Masyarakat Gampong Labuhan Bhakti.



Gambar 5. Wawancara dengan pihak Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.



Gambar 6. Wawancara dengan pedagang di Objek wisata.



Gambar 7. Wawancara dengan pedagang di Objek Wisata dan Masyarakat Gampong Labuhan Bhakti.



Gambar 8. Kondisi rumah makan dan kantin di Objek Wisata.



Gambar 9. Kondisi Kantin di Objek Wisata



Gambar 10. Kondisi Kantin di Objek Wisata



Gambar 11. Kondisi Kantin di Objek Wisata



Gambar 12. Kondisi Kantin di Objek Wisata



Gambar 13. Kondisi Pasar Gampong Labuhan Bakti



Gambar 14. Gerbang atau pintu masuk Wisata Pantai Thailand. Setiap orang yang masuk ke wisata, maka akan diambil biaya parkir sebesar Rp. 2.000 satu kendaraan (sepeda motor atau mobil).



Gambar 15. Kondisi wisata jembatan merah.



Gambar 16. Tulisan Simeulue di Objek Wisata.



Dokumentasi Sidang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Yuliana
Tempat/ Tanggal Lahir : Lataling/ 05 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 140404022
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa lataling, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue
No Telp/ HP : 085296983903

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD N 1 Teupah Selatan Tahun Lulus : 2008
SLTP/SMP : SMP N 3 Teupah Selatan Tahun Lulus : 2011
SLTA/SMA : SMA N 1 Teupah Selatan Tahun Lulus : 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014 sampai dengan sekarang

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Jumadan
Nama Ibu : Murniati
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Desa Lataling, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Peneliti,



Yuliana
140404022